



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-13.OT.03.01 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020-2024;
  - c. bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan panduan dalam melaksanakan rencana kerja tahunan atau rencana aksi reformasi birokrasi, serta mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- KETIGA** : *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Mei 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
  
SOMNIA H. LAOLY

## LAMPIRAN

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-13.OT.03.01 TAHUN 2023

Tanggal : 05 Mei 2023

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, sang Pengatur Alam Semesta, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "*Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024" dapat disusun dengan baik. Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu menyusun *road map* penajaman reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM agar selaras dengan *Road Map* penajaman reformasi birokrasi nasional seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 yang tersisa kurang dari 2 (dua) tahun akan difokuskan agar berdampak langsung terhadap pembangunan nasional maupun dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, selain tetap melanjutkan perbaikan terhadap tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan *agile*. Untuk itu penajaman reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM secara umum akan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu RB general dalam menyelesaikan permasalahan hulu RB serta RB tematik dalam menyelesaikan permasalahan hilir RB. RB general diharapkan dapat meningkatkan tata kelola birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan *Good Governance* sedangkan RB tematik diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap pembangunan nasional maupun dampak yang dapat dirasakan bagi masyarakat.

*Road map* penajaman reformasi birokrasi yang merupakan "*living document*" ini akan dipedomani dalam pelaksanaan reformasi birokrasi oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, baik tingkat pusat maupun daerah. Secara umum, pelaksanaan RB general dilaksanakan dalam mencapai 2 (dua) sasaran strategis RB, sedangkan pelaksanaan RB tematik ditujukan dalam mewujudkan sasaran strategis RB yang berdampak langsung bagi pembangunan nasional maupun bagi masyarakat Indonesia.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iiiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	3
1.3 Isu Strategis RB Tahun 2020-2024.....	3
1.4 Hasil Evaluasi RB Kementerian Hukum dan HAM .....	10
<b>BAB II TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM.....</b>	<b>19</b>
2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan RB Kementerian Hukum dan HAM.....	19
2.2. Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB Kementerian Hukum dan HAM .....	19
2.3. Kerangka Logis RB Kementerian Hukum dan HAM .....	21
<b>BAB III STRATEGI DAN KEGIATAN UTAMA REFORMASIBIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM .....</b>	<b>24</b>
3.1. Strategi RB Level Makro.....	24
3.2. Strategi RB Level Meso dan Peran Kementerian Hukum dan HAM .....	24
3.3. Strategi dan Kegiatan Utama RB Kementerian Hukum dan HAM .....	28
3.4. Rencana Aksi Pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.....	33
<b>BAB IV: MANAJEMEN/PENGELOLAAN RB KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM .....</b>	<b>151</b>
4.1. <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU) Kementerian Hukum dan HAM .....	151
4.2. Peran STU Kementerian Hukum dan HAM.....	153
4.3. Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM .....	155
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>156</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Perbedaan <i>Road Map</i> Lama dengan <i>Road Map</i> Penajaman RB.....	2
Gambar 1.2 Grafik Capaian Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2022.....	10
Gambar 2.1 Kerangka Logis RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.....	22
Gambar 4.1 Struktur STU Kementerian Hukum dan HAM.....	151

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Hasil Evaluasi RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2022.....	10
Tabel 1. 2 Hasil Evaluasi Aspek Hasil Antara RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2022 .....	12
Tabel 3. 1 Kegiatan Utama RB Level Meso Kementerian Hukum dan HAM .....	28
Tabel 3. 2 Rencana Aksi Pelaksanaan RB Level Meso sesuai Peran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 .....	33
Tabel 3. 3 Rencana Aksi Pelaksanaan RB General Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 .....	45
Tabel 3. 4 Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 .....	142

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) telah memasuki fase terakhir pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025 seperti diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dimana *road map* RBN tahun 2020-2024 ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), baik di tingkat makro, meso, maupun mikro. KemenPAN RB telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan MenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Hal ini didasarkan pada hasil evaluasi MenPAN RB terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang hingga saat ini masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Implementasi RB nasional, termasuk di Kementerian Hukum dan HAM, masih cenderung administratif dalam rangka memenuhi kriteria penilaian RB dalam mendapatkan nilai RB yang maksimal. Proses RB yang dilaksanakan berdasarkan 8 (delapan) area perubahan RB, yaitu penguatan organisasi, penguatan tata laksana, penguatan peraturan perundang-undangan atau deregulasi, penataan sistem manajemen SDM ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik hingga manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah dilaksanakan dengan baik, sesuai *road map* yang ditetapkan dan Kementerian Hukum dan HAM memperoleh nilai yang cukup tinggi berdasarkan evaluasi KemenPAN RB. Namun, hasil implementasi tersebut belum sepenuhnya berdampak langsung kepada masyarakat dan secara kuantitatif belum terlihat kontribusi terhadap pembangunan nasional.

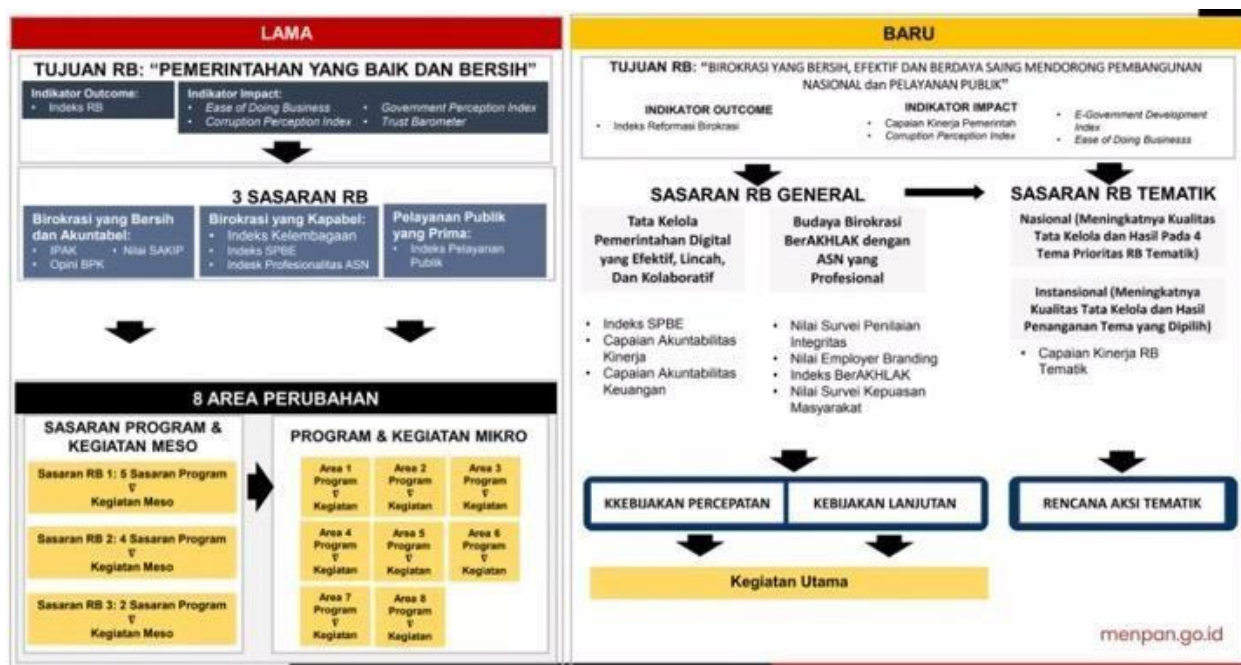
Selain itu, hasil evaluasi KemenPAN RB terhadap implementasi reformasi birokrasi nasional juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan (*gap*) dari sisi perencanaan maupun dari sisi pelaksanaan RB, dimana *gap* ini berpotensi menghambat terwujudnya cita-cita RBN tahun 2025 seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. *Gap* dari sisi perencanaan dimana konteks *Road Map* RB pada PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Sedangkan *gap* dari sisi pelaksanaan dimana pengelolaan RB level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat. Pelaksanaan RB masih dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing instansi pemerintah sehingga pelaksanaan RB belum fokus pada isu strategis nasional serta arah pembangunan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penajaman *Road Map* RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 yang selaras dengan *Road Map* RB tahun 2020-2024 seperti diamanatkan dalam PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 dalam



mewujudkan tujuan akhir RBN pada *grand design* RBN yang tertuang dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010.

Fokus pelaksanaan penajaman RB tahun 2020-2024 merubah orientasi pelaksanaan RB secara nasional maupun instansional. Perbedaan *road map* RB tahun 2020-2024 berdasarkan PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 (lama) dengan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 (baru) dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 1.1 Perbedaan *Road Map* Lama dengan *Road Map* Penajaman RB (Sumber: PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023)

Secara umum, tujuan RB mengalami penyempurnaan, dimana sebelumnya tujuan RB adalah **"Pemerintah yang baik dan bersih"** berubah menjadi **"Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik"**. Indikator keberhasilan untuk kedua tujuan ini tidak mengalami perubahan secara signifikan. Indikator *outcome* pada tujuan RB lama adalah "Indeks RB" sedangkan indikator *outcome* pada tujuan RB baru adalah "Indeks Reformasi Birokrasi". Indikator *impact* pada RB lama memiliki 4 (empat) indikator keberhasilan, yaitu (i) *Ease of Doing Business*, (ii) *Corruption Perception Index*, (iii) *Government Perception Index*, serta (iv) *Trust Barometer*. Sedangkan indikator *impact* pada RB baru juga memiliki 4 (empat) indikator keberhasilan, yaitu (i) Capaian Kinerja Pemerintah, (ii) *Corruption Perception Index*, (iii) *E-Government Development Index*, serta (iv) *Ease of Doing Business*.

Perubahan cukup signifikan dapat terlihat pada sasaran RB, dimana pada RB lama hanya digunakan 3 (tiga) sasaran RB dengan 6 indikator sasaran yang hanya berfokus pada tata kelola pemerintahan. Sedangkan Sasaran RB pada RB baru menggunakan 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator yang terdiri dari 2 (dua) sasaran dan 7 (tujuh) indikator pada RB general yang fokus pada perbaikan tata Kelola pemerintahan serta 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator pada RB tematik. Hal ini berdampak terhadap kegiatan utama RB dimana pada RB lama, kegiatan utama dikelompokkan berdasarkan 8 (delapan) area perubahan sedangkan pada RB baru kegiatan utama difokuskan dalam mewujudkan 2 (dua) sasaran RB general dan 1 (satu) sasaran RB tematik, tidak lagi dikelompokkan berdasarkan 8 (delapan) area perubahan. RB tematik merupakan paradigma baru dalam implementasi RB yang akan dijelaskan pada bab berikutnya.

## 1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442).

## 1.3 Isu Strategis RB tahun 2020-2024

### 1.3.1. Isu Strategis RB Nasional

Isu RB nasional dibagi atas 2 (dua) kelompok isu, yaitu isu strategis RB di tingkat hulu serta isu strategis RB di tingkat hilir. Isu strategis RB di tingkat hulu berdasarkan pada hasil evaluasi MenPAN RB yang dituangkan dalam lampiran PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Birokrasi yang belum kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peranyang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

#### 2. Transformasi digital yang belum optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

### **3. Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas**

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PAN RB telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui sistem kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

Hingga saat ini, penyederhanaan struktur birokrasi masih terus dilakukan oleh Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) baik di tingkat I maupun tingkat II. Sedangkan mekanisme kerja baru masih dalam tahap perencanaan karena hal ini merupakan sesuatu yang baru dalam rangka penajaman RB tahun 2020-2024.

### **4. Integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala**

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang

ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta Budaya Integritas Tinggi dan Pelayanan Prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

**1. Hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan**

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun, dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target *output* dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

**2. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi**

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

### **3. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik**

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

### **4. Dampak inflasi yang tidak terkendali**

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

#### **1.3.2. Isu Strategis RB Instansional**

Isu strategis RB Instansional merupakan isu strategis RB Kementerian Hukum dan HAM yang dibagi berdasarkan 2 (dua) kelompok isu, yaitu isu strategis RB tingkat hulu serta isu strategis RB tingkat hilir. Isu strategis RB Kementerian Hukum dan HAM di tingkat hulu dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Pelaksanaan RB cenderung administratif**

Pelaksanaan RB di Kementerian Hukum dan HAM sudah cukup baik, terlihat dari tren capaian nilai RB yang meningkat dalam 5 tahun terakhir, walaupun pada tahun 2022 nilai RB Kementerian Hukum dan HAM mengalami penurunan 0,63 poin. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 dimana sebagian besar indikator RB yang digunakan masih bersifat internal dan administratif. Selain itu, pelaksanaan RB juga cenderung silo, dimana pelaksanaan program lintas antar Unit Eselon I (UE I) masih belum optimal. Beberapa kegiatan seperti penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) maupun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sudah dapat dilakukan secara kolaboratif dimana setiap UE I tidak hanya memikirkan kepentingan unit kerjanya saja, namun sudah dapat berkolaborasi dalam menyusun perencanaan yang terbaik bagi Kementerian Hukum dan HAM.

##### **2. Transformasi digital belum sepenuhnya terlaksana**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tengah digaungkan semenjak tahun 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam

Perpres tersebut diamanatkan setiap Kementerian Negara/LPNK/Pemda (K/L/P) untuk dapat menyusun arsitektur SPBE hingga peta rencana SPBE masing-masing K/L/P yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional. Salah satu permasalahan pada fase perencanaan SPBE adalah Perpres tentang arsitektur SPBE Nasional baru diundangkan pada tahun 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Hal ini berdampak pada pengesahan arsitektur SPBE K/L/P yang baru dapat diundangkan setelah Perpres tersebut diundangkan.

Kementerian Hukum dan HAM telah menindaklanjuti dengan menyusun turunan dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai turunan Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Namun hingga saat ini, Kementerian Hukum dan HAM belum mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang arsitektur SPBE Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini masih bersifat *draft* dan akan segera diundangkan. Hal ini karena Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional baru diundangkan pada 20 Desember 2022 sehingga Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan waktu dalam menyusun aturan turunannya.

Permasalahan lain terkait SPBE adalah integrasi sistem informasi yang belum sepenuhnya terlaksana, dimana terdapat beberapa sistem informasi yang masih dalam proses integrasi. Implementasi kebijakan satu data Kementerian Hukum dan HAM juga masih dalam proses, mengingat besarnya data yang dimiliki. Selain itu, permasalahan terkait data adalah belum sepenuhnya migrasi data Kementerian Hukum dan HAM selesai dari Pusat Data Kementerian Hukum dan HAM kedalam *environment* Pusat Data Nasional. Selain kompleksitas integrasi *data center* yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Data Nasional (PDN) juga belum tersedia dan siap dioperasikan. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM masih memanfaatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.

### **3. Penyederhanaan struktur belum tuntas**

Penyederhanaan birokrasi atau struktur organisasi dilaksanakan berdasarkan pada PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional yang dicabut sebagian (Pasal 28) melalui PermenPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan transformasi

jabatan eselon III dan IV dalam rangka penyederhanaan birokrasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hingga saat ini, penyederhanaan birokrasi terus dilakukan khususnya dalam memenuhi amanat PermenPAN RB Nomor 7 Tahun 2022. Kementerian Hukum dan HAM juga tengah menyelesaikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021. Restrukturisasi ini dilakukan guna menjalankan amanat regulasi baru maupun dalam rangka menyelesaikan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

**4. Mekanisme kerja baru belum dilaksanakan secara komprehensif**

Mekanisme kerja baru di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara komprehensif dikarenakan belum adanya kebijakan nasional sebagai payung hukum sekaligus pedoman pelaksanaannya. Namun Kementerian Hukum dan HAM sedang melakukan beberapa kajian terkait dengan mekanisme kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian Hukum dan HAM, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja (satker) kewilayahan. Mekanisme kerja baru ini merupakan kegiatan RB yang baru yang tidak terdapat pada *road map* RB sebelum penajaman.

**5. Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum sepenuhnya terimplementasi**

Budaya birokrasi BerAKHLAK merupakan *core values* yang harus dimiliki seluruh ASN, baik pada instansi pusat maupun daerah. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, serta Kolaboratif. Panduan implementasi *core values* BerAKHLAK ini dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN. Hingga saat ini, budaya birokrasi BerAKHLAK masih dalam tahap sosialisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dimana *core values* ini sudah dimasukkan sebagai sistem nilai pada Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kementerian Hukum dan HAM yang akan diundangkan pada tahun 2023 ini. Namun secara umum, *core values* berakhlak sudah diimplementasikan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM secara bertahap dan berjenjang.

**6. Perubahan regulasi RB terkait pelaksanaan maupun evaluasi pengukuran RB yang berubah dengan cepat**

Permasalahan penting yang menjadi salah satu hambatan dalam implementasi RB adalah perubahan regulasi terkait RB maupun komponennya yang terjadi sangat cepat. Misalnya, *road map* RB tahun 2020-2024 yang diundangkan melalui PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 sudah diubah menjadi PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023, dimana pedoman evaluasi pelaksanaan RB masih mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 yang masih mengacu pada PermenPAN RB Nomor 25 Tahun

2020. Hingga saat ini, regulasi terkait evaluasi pelaksanaan RB berdasarkan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 belum tersedia, sehingga Kementerian Hukum dan HAM hanya bisa menyusun *road map* RB tanpa mengetahui secara pasti barometer pengukuran dan evaluasi keberhasilan RB tersebut. Cepatnya perubahan regulasi terkait RB ini menyebabkan Kementerian Hukum dan HAM kesulitan dalam beradaptasi terhadap regulasi baru sementara regulasi sebelumnya belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

Selain isu strategis RB tingkat hulu, Kementerian Hukum dan HAM juga menghadapi isu strategis RB tingkat hilir. Isu strategis RB Kementerian Hukum dan HAM di tingkat hilir dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Pelaksanaan RB Kemenkumham belum memasukkan pelaksanaan RB tematik**

Pelaksanaan RB tematik terdiri dari 4 (empat) tema, yaitu (i) pengentasan kemiskinan, (ii) peningkatan investasi, (iii) digitalisasi administrasi pemerintah, serta (iv) percepatan prioritas aktual presiden terkait penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). RB tematik merupakan komponen RB yang baru yang tidak ada pada *roadmap* RB sebelumnya berdasarkan pada PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020. Hal ini menyebabkan rencana pelaksanaan RB tematik secara spesifik belum dimasukkan kedalam *road map* RB Kementerian Hukum dan HAM dan baru akan dimasukkan pada *road map* penajaman RB tahun 2020-2024 ini. Oleh karena itu, maka RB tematik sama sekali belum dilaksanakan dalam implementasi RB di Kementerian Hukum dan HAM.

**2. Kesulitan dalam menghubungkan RB Kementerian Hukum dan HAM dengan kegiatan RB tematik**

Kementerian Hukum dan HAM bukan kementerian teknis berbasis sektoral, sehingga kinerja Kementerian Hukum dan HAM tidak berdampak secara langsung dan signifikan terhadap keempat tema pada RB tematik. Hal ini memberikan kesulitan tersendiri bagi Kementerian Hukum dan HAM khususnya dalam menentukan kegiatan RB yang sesuai dengan keempat tema tersebut dan berdampak langsung serta signifikan. Namun Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya untuk memilih dan menentukan kegiatan RB yang paling sesuai dalam mendukung capaian keempat tema pada RB tematik tersebut.

**3. Pelaksanaan RBN tinggal 2 tahun, sedangkan pelaksanaan RB tematik membutuhkan waktu yang lebih dari 2 tahun**

Berdasarkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi seperti diamanatkan pada Perpres Nomor 81 Tahun 2010, maka pelaksanaan RB tinggal tersisa 2 (dua) tahun. Perubahan yang cukup transformasional, khususnya terkait RB tematik, membutuhkan waktu lebih dari 2 (dua) tahun dalam pelaksanaannya. Sehingga implementasi RB tematik berpotensi tidak dapat diselesaikan secara optimal dan/atau tidak dapat memberikan hasil capaian sesuai dengan harapan. Selain itu, masuknya tahun 2024 sebagai “tahun politik” dimana terjadi pergantian pimpinan nasional akan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan RB

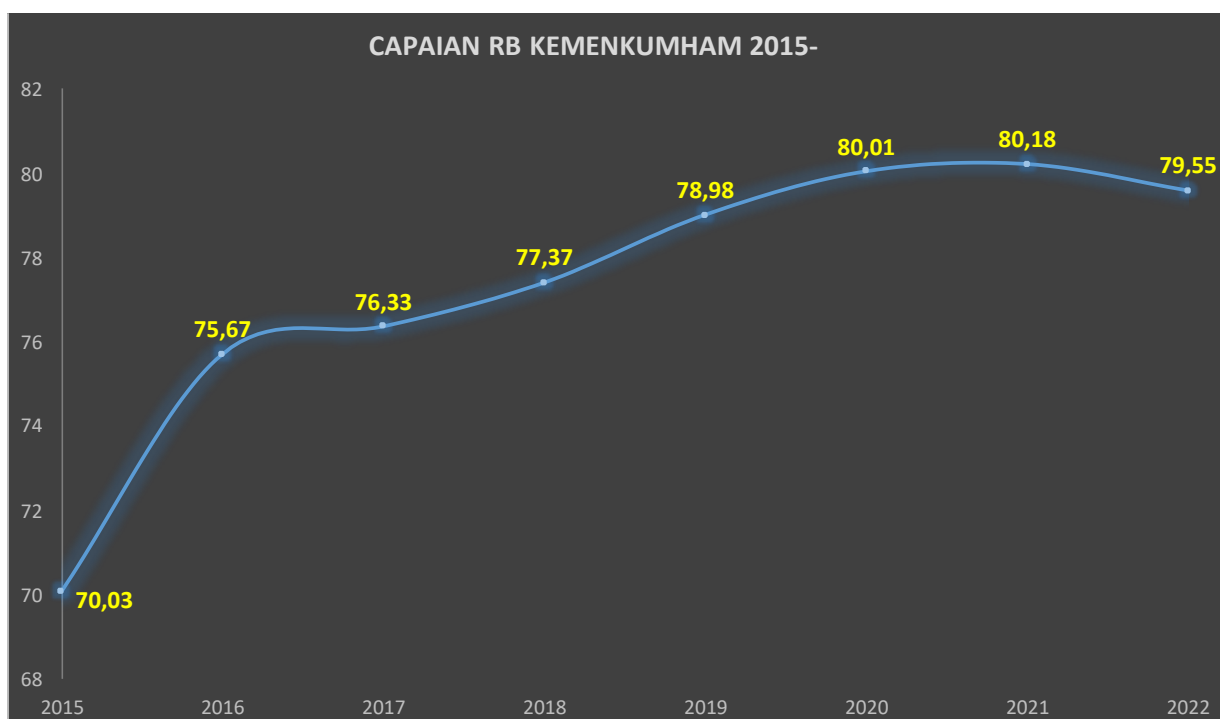


tematik pada tahun 2024 tersebut.

## 1.4 Hasil Evaluasi RB Kementerian Hukum dan HAM

### 1.4.1. Capaian RB Kementerian Hukum dan HAM

Pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan menunjukkan perbaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir dan hanya mengalami penurunan pada tahun 2022. Grafik berikut menggambarkan capaian nilai RB Kementerian Hukum dan HAM dari tahun 2015 hingga tahun 2022.



Gambar 1.2 Grafik Capaian Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2022

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa *trendline* capaian nilai RB Kementerian Hukum dan HAM cenderung meningkat semenjak tahun 2015 hingga tahun 2022. Penurunan nilai RB terjadi pada tahun 2021 ke tahun 2022, dimana pada tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan nilai RB sebesar 80,18 dengan kategori A dan turun 0,63 point menjadi 79,55 dengan kategori BB pada tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada beberapa sub komponen penilaian RB, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Hasil Evaluasi RB Kementerian Hukum Dan HAM Tahun 2020-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021	2022
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>				
I	Pemenuhan	20,00	18,07	18,33	18,86
II	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,96	6,92	7,16
III	Reform	30,00	20,74	20,98	20,90
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>45,77</b>	<b>46,23</b>	<b>46,92</b>
<b>A</b>	<b>Komponen Hasil</b>				
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,37	8,41	8,43
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,25	9,66	8,76
3	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	9,45	8,51	8,57
4	Kinerja Organisasi	10,00	7,17	7,37	6,87
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40,00</b>	<b>34,24</b>	<b>33,95</b>	<b>32,63</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>	<b>100,00</b>	<b>80,01</b>	<b>80,18</b>	<b>79,55</b>

Sumber: Kementerian PAN RB

Hasil penilaian RB yang dapat dibandingkan secara langsung adalah hasil penilaian RB tahun 2020, 2021 dan 2022 dikarenakan hasil evaluasi Kemen PANRB pada ketiga tahun ini menggunakan pedoman evaluasi yang sama, yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM tersebut, maka diketahui penyebab penurunan nilai RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 pada **komponen pengungkit adalah aspek *reform* yang turun dari 20,98 menjadi 20,90.**

Penilaian aspek *reform* ini didasarkan pada 8 (delapan) sub komponen, yaitu:

- Manajemen Perubahan (3%)
- Deregulasi Kebijakan (3%)
- Penataan Organisasi (4,5%)
- Penataan Tatalaksana (3,75%)
- Penataan Manajemen SDM (4,5%)
- Penguatan Akuntabilitas (3,75%)
- Penguatan Pengawasan (3,75%)
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%).

Hasil evaluasi Kemen PANRB secara kuantitatif tidak menjelaskan secara detail tentang sub komponen mana dari kedelapan sub komponen pada aspek *reform* tersebut yang menyebabkan penurunan, untuk itu maka analisis akan didasarkan pada hasil evaluasi secara kualitatif dengan melihat permasalahan yang diidentifikasi KemenPAN RB. Sedangkan penyebab penurunan dari komponen hasil adalah:

- **Kualitas pelayanan publik**

Hasil evaluasi atas sub komponen **kualitas pelayanan publik** mengalami **penurunan dari 9,66 pada tahun 2021 menjadi 8,76 pada tahun 2022.** Bahkan **capaian tahun 2022 lebih kecil dari capaian tahun 2020** yaitu sebesar 9,25. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020, kualitas pelayanan publik hanya ditentukan oleh 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan. Hal ini bermakna telah **terjadi penurunan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan** Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2022 dibanding tahun 2021 maupun tahun 2020. Kementerian Hukum dan HAM perlu menggali lebih dalam terkait komponen standar pelayanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengalami penurunan dan pada layanan publik yang mana, sehingga perbaikan kualitas pelayanan publik bisa lebih fokus.

- **Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN**

Hasil evaluasi sub komponen **pemerintahan yang bersih dan bebas KKN** pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2021, namun mengalami penurunan jika dibanding pada tahun 2020. Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan nilai 9,45 dari total nilai 10 untuk sub komponen pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada tahun 2020 dan menurun menjadi 8,51 pada tahun 2021 serta meningkat sedikit sebesar 8,57 pada tahun 2022. Berdasarkan

PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020, sub komponen pemerintahan yang bersih dan bebas KKN hanya ditentukan oleh 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi anti korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengalami penurunan jika dibanding pada tahun 2020 dimana hal ini berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Kementerian Hukum dan HAM.

▪ **Kinerja Organisasi**

Sub komponen kinerja organisasi pada komponen hasil (bobot 10%) menunjukkan penurunan capaian, dimana pada tahun 2022 Kementerian Hukum dan HAM mencapai nilai 6,87 dari skala 10 dan cenderung menurun dibanding tahun 2020 (7,17) maupun tahun 2021 (7,37). Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020, sub komponen kinerja organisasi diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator, yaitu (i) Capaian Kinerja (5%), (ii) Kinerja Lainnya (2%), serta (iii) Survei Internal Organisasi (3%). Berdasarkan ketiga indikator tersebut, diketahui bahwa terjadi penurunan hasil survei internal organisasi, dari 89,03 di tahun 2021 menjadi 83,11 pada tahun 2022. Sedangkan untuk kedua komponen lainnya tidak diketahui secara detail berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan KemenPAN RB. Hal ini bermakna bahwa terdapat permasalahan terkait dengancapaian kinerja maupun kapasitas internal organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang harus segera diatasi.

Lebih detail lagi, jika dilihat dari aspek hasil antara, maka capaian RB Kementerian Hukum dan HAM dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 2 Hasil Evaluasi Aspek Hasil Antara RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2022

No	Indikator Capaian	Skala	Indeks			Instansi Penilai
			2020	2021	2022	
1	Sistem Merit	0-400	336,5	336,5	373,5	KASN
2	Kualitas Kebijakan	0-100	-	25,56	25,56	LAN
3	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	-	2,28	3,23	Kemenkeu
4	Profesionalitas ASN	0-100	52	36,33	39,31	BKN
5	Implementasi SPBE	0-5	-	3,68	3,68	Kemenpan RB
6	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-	4,66	3,9	Kemenpan RB
7	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barangdan Jasa (PPBJ)	0-100	30	75,28	81,80	LKPP
8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	0-100	94,79	95,43	95,39	Kemenkeu
9	Maturitas SPIP	1-5	3	3	3	BPKP
10	Kapabilitas APiP	1-5	3	3	3	BPKP
11	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	90,71	81,81	79,91	ORI
12	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	85,53	74,6	71,66	ANRI
13	Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	100	Kemenkumham

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terdapat 4 indikator capaian yang

mengalami penurunan serta 1 indikator capaian yang stagnan dengan nilai yang masih sangat rendah. Indikator capaian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

**1. Indeks Kualitas Kebijakan yang sangat rendah**

Capaian kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan HAM mengalami stagnansi dimana tahun 2021 maupun tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM konsisten mendapatkan nilai 25,56 dari 100. Stagnansi tersebut terjadi karena Lembaga Administrasi Negara (LAN) hanya melakukan pengukuran IKK sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Capaian tersebut berarti bahwa kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan HAM masih rendah, yaitu 25,56% dari total nilai maksimal. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan mengingat salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM adalah terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan secara nasional, serta penyusunan kebijakan maupun regulasi terkait bidang Hukum dan HAM.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kepala LAN nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan, maka Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) diukur berdasarkan 2 (dua) proses dan 4 (empat) tahapan. Proses pertama adalah perencanaan kebijakan yang terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu *agenda setting* kebijakan serta formulasi kebijakan. Sedangkan proses kedua adalah evaluasi kemanfaatan kebijakan yang terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Peningkatan IKK Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu prioritas pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023-2024.

**2. Penurunan kualitas pelayanan publik**

Capaian kualitas penilaian publik mengalami penurunan cukup signifikan dari 4,66 dari skala 5 menjadi 3,9 pada skala 5, dimana secara statistik berarti terjadi penurunan 1 interval penilaian. Kualitas pelayanan publik diukur berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana kualitas pelayanan publik dinilai berdasarkan 9 (sembilan) unsur, meliputi (i) persyaratan, (ii) sistem, mekanisme, prosedur, (iii) waktu penyelesaian, (iv) biaya/tarif (dapat diganti pertanyaan lain jika biaya layanan tidak dibebankan kepada penerima layanan), (v) produk spesifikasi jenis pelayanan, (vi) kompetensi pelaksana (dapat diganti pertanyaan lain jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis *website*), (vii) perilaku pelaksana (dapat diganti pertanyaan lain jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis *website*), (viii) penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta (ix) sarana dan prasarana.

Hal ini perlu menjadi perhatian khusus mengingat komponen dan sub komponen pelayanan publik secara konsisten mengalami penurunan, baik pada aspek hasil antara dan aspek reform pada komponen pengungkit, maupun pada komponen hasil. Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan revitalisasi pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

### 3. **Penurunan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik**

Nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan nilai 90,71 untuk indikator ini dan menurun pada tahun 2021 menjadi 81,81 dan terus menurun menjadi 79,91 pada tahun 2022. Hal ini menandakan dari waktu ke waktu kepatuhan terhadap standar pelayanan publik semakin menurun, sehingga berdampak terhadap kepuasan masyarakat atas layanan publik yang diberikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, terdapat 6 (enam) komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan serta 8 (delapan) komponen standar pelayanan yang terkait dengan pengelolaan pelayanan. Berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN RB, penurunan kepatuhan terhadap standar pelayanan diakibatkan inovasi-inovasi yang dilakukan, baik di unit pusat maupun di unit kerja wilayah belum sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami dengan baik oleh pengguna layanan.

### 4. **Penurunan pada kualitas pengelolaan arsip**

Capaian kualitas pengelolaan arsip mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kementerian Hukum dan HAM memperoleh nilai 74,6 pada tahun 2021 dan sedikit menurun menjadi 71,66 pada tahun 2022. Jika dibandingkan dari tahun 2020, maka capaian kualitas pengelolaan arsip terus mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 85,53. Hal ini juga perlu menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM terkait peningkatan kualitas pengelolaan arsip.

Berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan arsip elektronik, Pengelolaan Arsip Elektronik (PAE) dilaksanakan melalui 9 (sembilan) tahapan, yaitu:

- a. Pembuatan dan Penerimaan Arsip Elektronik
- b. Penggunaan Arsip Elektronik
- c. Penyimpanan Arsip Elektronik
- d. Pemeliharaan dan Alih Media Arsip Elektronik
- e. Pemeliharaan dan Alih Media Arsip Elektronik
- f. Akuisisi Arsip Elektronik
- g. Deskripsi dan Pengolahan Arsip Elektronik
- h. Preservasi Digital
- i. Akses dan pemanfaatan Arsip Elektronik

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, maka Kementerian Hukum dan HAM perlu mengoptimalkan pelaksanaan 9 (sembilan) tahapan PAE tersebut, baik di Satker Pusat maupun di Satker Kewilayahan.

## 5. **Penurunan pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 sebenarnya masih relatif stabil, dimana nilai IKPA tahun 2021 sebesar 95,43 dan nilai IKPA tahun 2022 hanya mengalami penurunan sebesar 0,04 menjadi 95,39. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 94,79 maka terjadi sedikit peningkatan. Oleh karena itu walaupun mengalami penurunan, namun *trendline* capaian IKPA Kementerian Hukum dan HAM masih dianggap stabil.

Kementerian Hukum dan HAM juga telah mencapai beberapa **keberhasilan terkait implementasi RB tahun 2022** berdasarkan evaluasi MenPAN RB. Seluruh keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari komitmen pimpinan yang tinggi serta komitmen seluruh satuan kerja dan seluruh ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan RB. Keberhasilan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. **Peningkatan Nilai SAKIP**

Kementerian Hukum dan HAM telah berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari 76,85 pada tahun 2021 menjadi 77,54 pada tahun 2022. Capaian ini merupakan capaian nilai SAKIP tertinggi semenjak tahun 2017.

### 2. **Opini BPK atas laporan keuangan**

Kementerian Hukum dan HAM berhasil mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada opini BPK atas laporan keuangan Kementerian hukum dan HAM. Status WTP ini sudah diraih Kementerian Hukum dan HAM semenjak tahun 2017 dan sekaligus menunjukkan kinerja akuntabilitas keuangan yang tinggi dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Hukum dan HAM.

### 3. **Peningkatan nilai kualitas PPBJ**

Kementerian Hukum dan HAM telah berhasil meningkatkan indeks kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dari 75,28 pada tahun 2021 menjadi 81,80 pada tahun 2022. Peningkatan ini cukup signifikan mengingat pada tahun 2020 Kementerian Hukum dan HAM hanya berhasil memperoleh nilai 30 dari 100 terkait PPBJ.

### 4. **Peningkatan Indeks sistem merit**

Kementerian Hukum dan HAM juga berhasil meningkatkan capaian indeks sistem merit dengan cukup signifikan, dari 336,5 pada tahun 2021 menjadi 373,5 pada tahun 2022. Capaian ini semakin mendekati sempurna dimana penilaian sistem merit menggunakan indeks 0-400. Sehingga, jika dihitung berdasarkan skor tertinggi, maka Kementerian Hukum dan HAM telah berhasil mencapai 93,375% untuk indeks sistem merit ini.

### 5. **Peningkatan Indeks pengelolaan aset**

Indeks pengelolaan aset yang berhasil dicapai Kementerian Hukum dan HAM juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Sebelumnya pada tahun 2021 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Hukum dan HAM sebesar 2,28 dan kemudian meningkat menjadi 3,23 dari skala pada tahun 2022. Hal ini berarti

capaian indeks ini telah mencapai 80,75% dari nilai maksimal dibanding sebelumnya sebesar 57% pada tahun sebelumnya.

#### **6. Indeks Reformasi Hukum**

Kementerian Hukum dan HAM berhasil memperoleh nilai maksimal dalam Indeks Reformasi Hukum, yaitu sebesar 100. Nilai ini merupakan nilai tertinggi di Indonesia dan menunjukkan reformasi hukum di Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan indeks ini telah tercapai maksimal. Walaupun indeks ini merupakan indikator baru, namun Kementerian Hukum dan HAM berhasil menunjukkan komitmen yang tinggi dan berhasil meraih nilai maksimal.

#### **7. Sistem nilai (*core values*) Kemenkumham sudah mengakomodir *Core Values BerAKHLAK* menjadi Kemenkumham PASTI BerAKHLAK**

*Core values* BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, serta Kolaboratif. Panduan implementasi *core values* BerAKHLAK ini dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values dan Employer Branding* ASN. Kementerian Hukum dan HAM telah memasukkan *core values* BerAKHLAK ini kedalam sistem nilai pada Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 yang masih dalam proses pengundangan. Sehingga system nilai atau *core values* ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bertambah menjadi **PASTI BerAKHLAK**.

Selain 7 keberhasilan yang telah diuraikan sebelumnya, MenPAN RB juga memberikan penilaian secara kualitatif berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022. Beberapa hal positif yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan evaluasi MenPAN RB adalah:

1. Kementerian Hukum dan HAM **telah memanfaatkan aplikasi *e-Performance*** sebagai aplikasi pengukuran capaian Perjanjian Kinerja;
2. Inspektorat Kementerian Hukum dan HAM **telah melakukan audit tematik** walaupun belum menyentuh pada isu strategis;
3. Beberapa **inovasi yang ada di level satuan kerja sudah diadopsi di level pusat** dan menjadi kebijakan terpusat.

#### **1.4.2. Permasalahan pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM**

Berdasarkan analisis capaian RB Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya serta berdasarkan hasil evaluasi Men PANRB terhadap pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022, maka beberapa permasalahan strategis yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Manajemen SDM belum terkelola dengan baik, pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi belum dilakukan secara optimal, baru dilakukan pada sebagian kecil jabatan.
2. Capaian PK belum dijadikan dasar sebagai penentuan prestasi kepala satker.
3. Aplikasi terkait monitoring capaian kinerja yaitu *e-Performance*, *e-Tarja* dan

SIMPeg yang dikembangkan belum terintegrasi. Selain itu, hasil pengukuran belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*.

4. Inovasi-inovasi yang dilakukan, baik di unit pusat maupun di unit kerja wilayah belum sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami dengan baik oleh pengguna layanan. Hal ini tercermin dari penurunan nilai kualitas pelayanan publik di komponen hasil dan juga pada hasil antara yaitu kualitas pelayanan publik dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
5. Mitigasi risiko yang dibangun belum sepenuhnya memetakan risiko yang bersifat strategis untuk mencapai sasaran kinerja baik terkait pelayanan maupun peningkatan integritas.
6. Pembangunan zona integritas cukup massif, namun monev terhadap E-RB terhadap satker WBK/WBBM belum kearah substansi dan keberlangsungan program, masih terbatas pemantauan secara administratif.

#### 1.4.3. Rekomendasi Menteri PAN RB

Kementerian PAN RB memberikan rekomendasi pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Rekomendasi ini akan menjadi bagian dalam pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM pada *road map* penajaman RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024. Beberapa rekomendasi Kementerian PAN RB tersebut adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan **sistem manajemen SDM**, antara lain dengan **pemetaan talenta pegawai sebagai dasar penempatan jabatan yang bersifat kritikal/suksesi**. Selanjutnya menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan pada PermenPAN RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN.
2. Menyusun **standar terkait mekanisme promosi dan mutasi personel**, serta **memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar yang ditetapkan**, termasuk **menjadikan capaian dari Perjanjian Kinerja sebagai salah satu dasar penentuan prestasi individu**.
3. **Mengoptimalkan serta mengintegrasikan aplikasi yang ada terkait manajemen kinerja** sehingga lebih efektif dan efisien serta **menggunakan hasil monitoring** tersebut sebagai **dasar pemberian *reward and punishment*** dengan **memperhitungkan capaian kinerja organisasi dan kinerja masing-masing individu**.
4. Melakukan **identifikasi risiko terhadap isu-isu strategis** yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan **menyusun sistem pengendalian risiko** untuk meminimalisir dampak atas risiko tersebut.
5. Melakukan **analisa mendalam terhadap survei yang dilakukan terhadap pengguna layanan**, sehingga dalam pengembangan inovasi dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan.
6. Melakukan **sosialisasi dengan masif atas program maupun inovasi yang dibuat** Kementerian Hukum dan HAM, sehingga pengguna layanan dapat terinformasi dengan baik dan memanfaatkan inovasi tersebut tanpa kendala



7. **Memfaatkan program pembangunan ZI** terutama pada unit kerja layanan utama, sebagai **upaya percepatan penerapan RB** dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian Hukum dan HAM dan *stakeholders* yang dilayani serta mengoptimalkan Monev terhadap unit kerja yang telah berpredikat menuju WBK/WBBM pada aplikasi E-RB.

Selain 7 (tujuh) rekomendasi diatas, Kementerian PAN RB juga mencatat **3 (tiga) rekomendasi RB Kementerian Hukum dan HAM** berdasarkan evaluasi RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 **yang belum optimal dilaksanakan**. Rekomendasi tersebut adalah:

1. Membangun aplikasi E-RB yang digunakan sebagai alat pemantauan unit kerja yang mengajukan ZI;
2. Menetapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar di seluruh Unit Eselon I;
3. Melakukan pembangunan zona integritas secara masif dan pada tahun 2022 terdapat 3 unit kerja yang memperoleh predikat menuju WBK.

## BAB II TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

### 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan RB Kementerian Hukum dan HAM

Tujuan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa terlepas dari Tujuan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang diamanatkan dalam PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023. Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah **“Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”**. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan *road map* RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 setelah penajaman adalah:

**“Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersih, efektif dan berdaya saing dalam mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”**

Indikator tujuan merepresentasikan ukuran keberhasilan atas tujuan RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024. Indikator tujuan dari tujuan RB Kementerian Hukum dan HAM adalah **“Indeks reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”** dengan **target tahun 2023 sebesar 87 dan target tahun 2024 sebesar 90**.

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM yang dimaksud disini bukan indeks yang diukur menggunakan Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020, melainkan kebijakan baru pengganti Permen PANRB tersebut yang meliputi 2 (dua) aspek, yaitu **Nilai RB General serta Nilai RB Tematik** sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023.

### 2.2. Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Strategis (SS) RB Nasional disusun dalam mewujudkan Tujuan RB Nasional, dimana SS RB Nasional menjadi acuan dalam menyusun SS RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023, SS RB Nasional terdiri 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu:

#### 1. **SS.1. Tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif**

Sasaran Strategis ini merupakan SS untuk RB General, yang fokus pada perbaikan tata kelola internal birokrasi pemerintahan. Kinerja SS ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran Strategis (ISS), yaitu:

- ISS.1 : Indeks SPBE
  - ISS. 2: Capaian Akuntabilitas Kinerja
  - ISS. 3: Capaian Akuntabilitas Keuangan
- 2. SS.2 Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK dengan ASN Profesional**
- Sasaran Strategis ini merupakan SS untuk RB General yang fokus dalam menguatkan profesionalitas ASN dan budaya kerja ASN yang berAKHLAK. Selain itu, sasaran ini juga fokus pada kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM. Kinerja SS ini diukur dengan 4 (empat) Indikator Sasaran Strategis (ISS), yaitu:
- ISS. 4: Nilai survey penilaian integritas (SPI)
  - ISS. 5: Nilai *employer branding*
  - ISS. 6: Indeks berAKHLAK
  - ISS. 7: Nilai survei kepuasan masyarakat
- 3. SS.3 Meningkatnya pelaksanaan RB Tematik**
- Sasaran Strategis ini merupakan SS untuk RB Tematik yang fokus menilai hasil pelaksanaan RB tematik yang meliputi 4 (empat) tema pilihan. Kinerja SS ini diukur dengan Indikator Sasaran Strategis (ISS) ISS. 8: Capaian (Nilai) Kinerja RB Tematik.

SS dan ISS RB nasional tersebut diterjemahkan ke dalam SS dan ISS RB Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan tujuan strategis RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024. Sehingga, **SS RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024** adalah **“SS.1 Birokrasi Kemenkumham yang bersih, efektif dan berdaya saing dalam mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”** dengan **“ISS.1 Indeks RB Kemenkumham”**. Kedua SS ini diturunkan menjadi Sasaran Program (SP) **“SP.1 Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien** dengan 2 (dua) Indikator Sasaran Program (ISP), yaitu **“ISP. 1: Nilai RB General Kementerian Hukum dan HAM”**, serta **“ISP. 2: Nilai RB Tematik Kementerian Hukum dan HAM”**

SP.1 RB Kementerian Hukum dan HAM diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) RB Kementerian Hukum dan HAM yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. SK.1. Terciptanya Tata kelola pemerintahan digital Kemenkumham yang efektif, lincah dan kolaboratif**  
Keberhasilan SK ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) ISK, yaitu:
  - ISK.1 : Indeks SPBE
  - ISS. 2: Nilai SAKP Kementerian Hukum dan HAM
  - ISS. 3: Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM
- 2. SK.2 Budaya Birokrasi Kemenkumham yang BerAKHLAK dengan ASN Profesional**  
Keberhasilan SK ini diukur dengan menggunakan 4 (empat) ISK, yaitu:
  - ISS. 4: Nilai survei penilaian integritas (SPI)

- ISS. 5: Nilai *employer branding*
- ISS. 6: Indeks berAKHLAK
- ISS. 7: Nilai survey kepuasan masyarakat

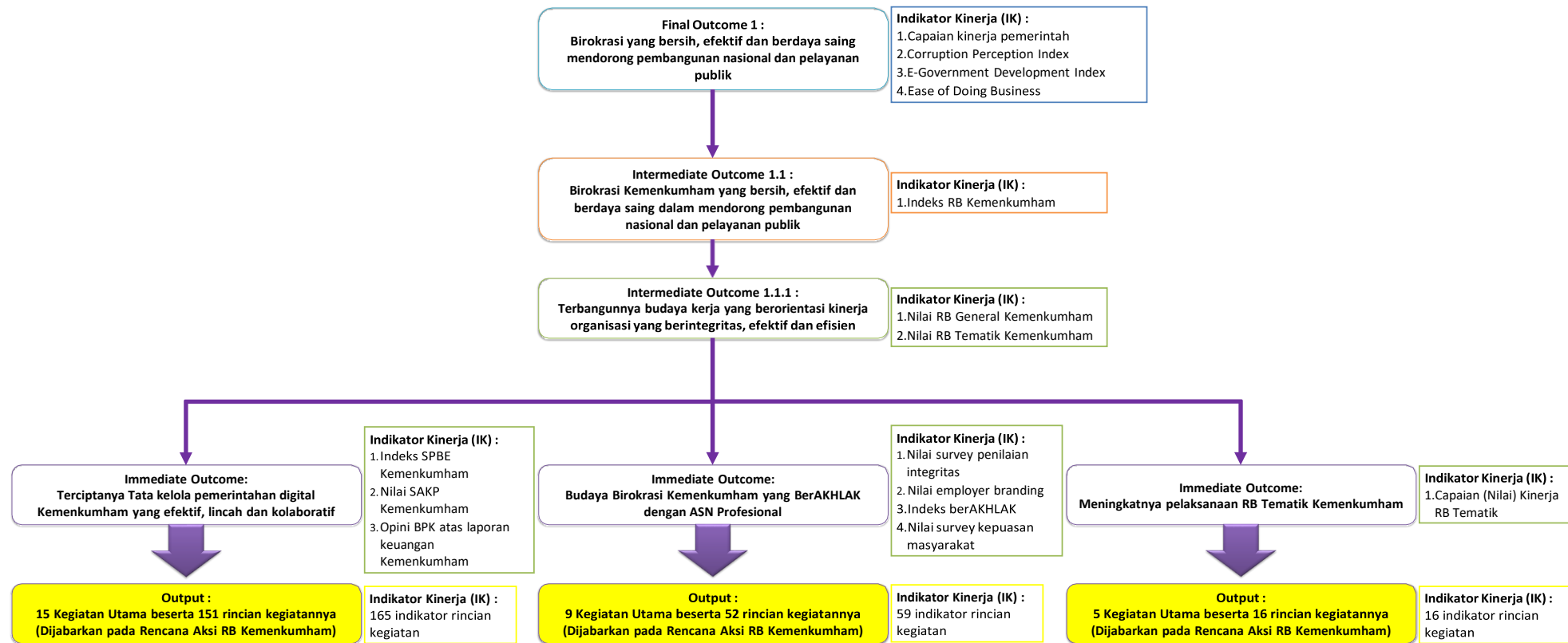
### 3. **SK.3 Meningkatnya pelaksanaan RB Tematik**

SK ini diukur dengan 1 (satu) Indikator Sasaran Kegiatan (ISK), yaitu “ISK.8: Capaian (Nilai) Kinerja RB Tematik”.

Struktur pendelegasian kinerja ini dilakukan selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 yang disusun sebelum PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 dikeluarkan, sehingga penggunaan nomenklatur sasaran akan berbeda dengan Renstra, namun dengan substansi yang sama. Pelaksanaan RB Tematik secara spesifik belum ditentukan pada Renstra terkait pelaksanaan RB, namun kegiatan utama dipastikan sudah masuk kedalam *Output* Renstra atau komponen/sub komponen pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA KL). Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan penajaman RB dianggarkan dan dilaksanakan sesuai *road map* yang disusun.

#### 2.3. **Kerangka Logis RB Kementerian Hukum dan HAM**

Kerangka logis RB Kementerian Hukum dan HAM digambarkan dalam pohon kinerja yang merepresentasikan penjenjangan kinerja RB Kementerian Hukum dan HAM. Kerangka logis RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020- 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Logis RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa *outcome* akhir yang ingin dicapai dalam RB Nasional adalah “**Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik**” dengan 4 (empat) indikator kinerja. Untuk mendukung *outcome* akhir tersebut, maka *intermediate outcome* Kementerian Hukum dan HAM adalah “**Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersih, efektif dan berdaya saing dalam mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik**” dengan indikator kinerja “**Indeks RB Kementerian Hukum dan HAM**”.

*Intermediate Outcome* 1.1 di level kinerja strategis sektor (Kementerian) diuraikan menjadi *Intermediate Outcome* 1.1.1 di level kinerja strategis sub sektor (Eselon I), yaitu “**Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien**” dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. **Nilai RB General Kementerian Hukum dan HAM**
2. **Nilai RB Tematik Kementerian Hukum dan HAM**

*Intermediate Outcome* 1.1.1 di level kinerja strategis sub sektor (Eselon I) diturunkan menjadi 3 (tiga) *immediate outcome* dengan 8 (delapan) indikator kinerja di level kinerja taktikal (Eselon II) beserta *output* kinerja masing-masing, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. ***Immediate Outcome* 1.1.1.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital Kemenkumham yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif**

*Immediate outcome* 1.1.1.1 ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

- 1 : Indeks SPBE
- 2 : Nilai SAKP Kementerian Hukum dan HAM
- 3 : Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM

*Immediate outcome* 1.1.1.1 ini kemudian diturunkan menjadi 15 kegiatan utama dengan 151 rincian kegiatan beserta indikatornya yang dijabarkan dalam tabel rencana aksi RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

2. ***Immediate Outcome* 1.1.1.2: Budaya Birokrasi Kemenkumham yang BerAKHLAK dengan ASN Profesional**

*Immediate outcome* 1.1.1.2 ini diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

- 4: Nilai survei penilaian integritas (SPI)
- 5: Nilai *employer branding*
- 6: Indeks BerAKHLAK
- 7: Nilai survei kepuasan masyarakat

*Immediate outcome* 1.1.1.2 ini kemudian diturunkan menjadi 9 kegiatan utama dengan 52 rincian kegiatan beserta indikatornya yang dijabarkan dalam tabel rencana aksi RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

3. ***Immediate Outcome* 1.1.1.3: Meningkatnya pelaksanaan RB Tematik**

*Immediate outcome* 1.1.1.3 ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “8. Capaian (Nilai) Kinerja RB Tematik”. *Immediate outcome* 1.1.1.3 ini kemudian diturunkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama dengan 16 rincian kegiatan beserta indikatornya yang dijabarkan dalam tabel rencana aksi RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

## **BAB III STRATEGI DAN KEGIATAN UTAMA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

### **3.1. Strategi RB Level Makro**

Strategi RB level makro merupakan strategi RB tingkat nasional yang disusun dalam mewujudkan tujuan penajaman RB nasional, yaitu “**Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik**”. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023, maka terdapat 2 (dua) strategi RB level makro yang menjadi acuan seluruh Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintah Daerah (K/L/P) dalam melaksanakan RB, yaitu:

- **Strategi 1: Mendorong Percepatan Digitalisasi Birokrasi**

Birokrasi digital diyakini sebagai strategi paling cepat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, responsif, dan adaptif sehingga mampu mendorong percepatan berbagai program pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat dan mudah, serta menekan terjadinya penyimpangan yang sangat mungkin terjadi apabila dilakukan secara manual tanpa teknologi.

- **Strategi 2: Melaksanakan RB Tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah**

RB Tematik merupakan kontribusi langsung maupun tidak langsung pelaksanaan RB oleh K/L/P terhadap pembangunan nasional. Penetapan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan administrasi pemerintah sebagai tema yang diangkat dalam RB Tematik dilakukan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi COVID-19.

### **3.2. Strategi RB Level Meso dan Peran Kementerian Hukum dan HAM**

Strategi RB pada level meso dilaksanakan untuk memastikan berbagai arahan kebijakan RB level makro yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan utama yang efektif mencapai tujuan dan sasaran strategis RB. Strategi RB level meso dijabarkan berdasarkan 2 (dua) strategi level makro, dimana untuk **Strategi 1: Mendorong Percepatan Digitalisasi Birokrasi**, maka ditetapkan 9 (Sembilan) kebijakan birokrasi digital, meliputi:

- 1. Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile**

Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi”. Melalui implementasi sistem kerja baru, birokrasi yang sangat hierarkis dan mengandalkan struktur yang sangat rigid diharapkan berubah menjadi organisasi yang lebih lincah. Transformasi ini dilakukan dengan

memangkas struktur organisasi menjadi dua tingkat (layer) serta menghilangkan sekat-sekat yang menghambat koordinasi antar instansi.

## **2. Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional**

Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional”. Kebijakan ini dilakukan untuk membangun kompetensi pada jabatan fungsional (JF) dan membangun mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Transformasi Jabatan Fungsional ditujukan agar JF lebih berorientasi kepada kinerja *output* yang mendukung mekanisme kerja *agile organization* yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan dinamis baik didalam satu instansi maupun antar instansi pemerintah untuk memindahkan orientasi ASN dari otoritas dan komando kepada fungsi dan kinerja serta kolaborasi

## **3. Percepatan Transformasi *Squad Model***

Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN”. Melalui sistem kerja baru yang berbasis *squad team*, organisasi diarahkan menjadi organisasi berbasis kinerja, karena seorang ASN dapat bekerja lintas departemen, bahkan lintas instansi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

## **4. Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan *SuperApps*-Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi**

Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya kebijakan arsitektur SPBE Nasional” yang menjadi kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital pemerintah. Untuk mendukung sasaran ini perlu dilakukan transformasi organisasi yang didukung dengan digitalisasi manajemen ASN. Hal ini dilakukan agar manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja antar instansi dapat terkoneksi satu sama lain. Mengingat masalah yang saat ini terjadi adalah sistem informasi kepegawaian masih tersebar di beberapa kementerian/lembaga, data belum terintegrasi, pemanfaatan data, dan informasi kepegawaian untuk perumusan kebijakan masih minim, dan kapasitas SDM pengelola kepegawaian belum optimal. Untuk itu, keterpaduan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja yang tentunya memerlukan bagi pakai data dan informasi, aplikasi, maupun infrastruktur pendukung yang nantinya dapat berguna sebagai basis data dalam pengelolaan ASN secara nasional melalui sebuah *SuperApps*. Selain itu *SuperApps* tentunya perlu juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi dalam rangka kebutuhan keterpaduan layanan digital lainnya, dimana seluruh sistem elektronik di pemerintahan perlu dipetakan dan disatukan sesuai dengan klasifikasi referensinya untuk dimanfaatkan menjadi satu sistem berbagi pakai terintegrasi.

## **5. Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN**

Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang efektif dan efisien”. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung mekanisme kerja *agile* yang dapat dilakukan dengan kebijakan talenta dan karir, melalui strategi akuisisi talenta, strategi klasifikasi talenta, penyiapan *talent pool*, strategi mobilitas



talenta, strategi pengembangan talenta, strategi retensitalenta dan strategi suksesi yang baik.

**6. Penguatan Kerja Kolaboratif (*Collaborative Working*) Berbasis Kinerja melalui SAKP Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP)**

Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar lembaga agar pencapaian sasaran RB dapat lebih terasa dampaknya pada pencapaian tujuan/sasaran pembangunan nasional. Melalui SAKP, setiap K/L/P dapat dipastikan dan diukur kontribusi akuntabilitas kinerjanya secara terukur sesuai peran masing-masing dalam pencapaian target-target kinerja prioritas pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMN/RPJMD maupun RKP/RKPD. Tiap-tiap K/L/P yang terkait harus saling berkolaborasi dalam pencapaian tujuan/sasaran pembangunan sesuai tugas dan fungsinya sejak fase perencanaan, fase pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

**7. Pembangunan MPP dan MPP *Digital Services***

Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih prima, cepat, dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)”, yaitu berbagai layanan yang bisa diakses masyarakat melalui dunia digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya, efektivitas kerja dan transparansi bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan swasta.

**8. Penguatan Pengawasan dengan *Four Line of Defense***

Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” yang dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev tindak lanjut hasil pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Sehingga pelaksanaan dan hasil pengawasan dapat lebih efektif, efisien, dan berdampak pada percepatan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan dan instansi serta penurunan praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Selama ini hasil pengawasan tidak dijadikan bahan untuk perbaikan kebijakan, tata kelola dan kualitas kebijakan (*double loop learning*) secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Untuk mencapai birokrasi digital sistem pengawasan perlu diperkuat dengan sinergi dan kolaborasi antar organisasi didukung dengan aparat yang profesional (*internal audit capability model*) dan independensi aparat (*clear flow of authority*), serta menggunakan sistem informasi manajemen pengawasan yang terintegrasi antar instansi

pengawasan yang terkait, sehingga sistem pengawasan mampu menjadi peringatan dini (*Early Warning System*) adanya praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

#### **9. Penguatan Kebijakan Publik Berbasis Bukti dengan *Big Data* dan *Artificial Intelligent***

Muara dari pemanfaatan teknologi atau *SuperApps* adalah penyediaan data secara *real time* dan mutakhir yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan publik berbasis kecerdasan buatan. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi”, yaitu setiap kebijakan publik dan regulasi yang akan diterbitkan oleh instansi harus berdasarkan pada bukti dari sumber data relevan dan valid sehingga kualitas kebijakan yang akan diterbitkan dan diimplementasikan menjadi lebih efektif karena dapat menjadi solusi dalam setiap isu strategis yang menjadi latar belakang terbitnya kebijakan dan regulasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini diperlukan peningkatan kualitas data dan informasi pemerintah sehingga tentunya diperlukan penguatan sistem statistik nasional, baik dalam penyelenggaraan statistik dasar maupun statistik sektoral.

Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan **Strategi 2: Melaksanakan RB Tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah**, maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik yang menjadi prioritas khususnya pada tahun 2023 dan 2024.

Dalam melaksanakan RB level meso, Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran sebagai *leading institution* untuk memastikan 2 (dua) hal, yaitu **(i) Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi**, serta memastikan **(ii) Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan**. *Output* utama yang ingin diwujudkan adalah **“Terlaksananya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik”** dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai penanggung jawab *output*. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga bertanggung jawab atas *output* utama **“Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan”**. Peran, kewenangan, dan tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM sebagai *leading institution* dalam pelaksanaan RB level meso adalah:

1. Merumuskan kebijakan inovatif
2. Menerjemahkan kebijakan makro terkait indikator
3. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta
5. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam pelaksanaan reformasi birokrasi *general*, yaitu laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan kegiatan utama RB level meso kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN).

Berdasarkan peran, kewenangan, dan tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM sebagai *leading institution* tersebut, maka kegiatan utama RB level meso berdasarkan tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Kegiatan Utama RB Level Meso Kementerian Hukum dan HAM

No.	PERAN KEMENKUMHAM DALAM PELAKSANAAN RB LEVEL MESO	KEGIATAN UTAMA
I	Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi	I.1 Penyusunan rekomendasi, pemantauan, dan peninjauan serta perancangan peraturan perundang-undangan
		I.2 Pembinaan peraturan perundang-undangan
		I.3 Harmonisasi peraturan perundang-undangan
		I.4 Pengundangan, penerjemahan, dan publikasi
		I.5 Penyelesaian keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban termohon di MA
		I.6 Penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan
II	Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	II.1 Uji publik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Detail kegiatan utama dan rincian kegiatan akan dijabarkan pada sub bab rencana aksi RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

### 3.3. Strategi dan Kegiatan Utama RB Kementerian Hukum dan HAM

Strategi RB level mikro merupakan Strategi pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pelaksanaan strategi RB level meso maupun level makro. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023, terdapat 2 (dua) strategi RB level mikro, yaitu:

1. Strategi 1. Dimensi Prioritas Nasional
2. Strategi 2. Dimensi Prioritas Instansional

Kedua strategi RB level mikro tersebut kemudian diturunkan menjadi 5 (lima) tahapan RB level mikro, yaitu:

1. Menentukan *road map* RB
2. Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB
3. Mengelola pelaksanaan rencana aksi
4. Monitoring dan evaluasi RB
5. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)

Berdasarkan hal tersebut, maka strategi dan kegiatan utama pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

1. **Strategi 1: Mendorong percepatan digitalisasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan birokrasi digital dalam meningkatkan layanan publik berkualitas**, sebagai strategi RB General. Strategi ini dilaksanakan melalui

**15 kegiatan utama**, yaitu:

- K.1 Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile* di Kementerian Hukum dan HAM.
- K.2 Penyelarasan proses bisnis dan SOP
- K.3 Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN Kementerian Hukum dan HAM
- K.4 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional di Kementerian Hukum dan HAM
- K.5 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi di Kementerian Hukum dan HAM
- K.6 Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital Kementerian Hukum dan HAM
- K.7 Pembangunan Zona Integritas di unit kerja Kementerian Hukum dan HAM
- K.8 Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Kementerian Hukum dan HAM
- K.9 Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kementerian Hukum dan HAM
- K.10 Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi di Kementerian Hukum dan HAM
- K.11 Penguatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik
- K.12 Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik di Kementerian Hukum dan HAM
- K.13 Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan di Kementerian Hukum dan HAM
- K.14 Pelaksanaan Arsip Digital di Kementerian Hukum dan HAM
- K.15 Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)
- K.16 Pelaksanaan Data Statistik Sektorial di Kementerian Hukum dan HAM
- K.17 Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kementerian Hukum dan HAM.
- K.18 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kementerian Hukum dan HAM

Masing-masing kegiatan utama tersebut dilaksanakan melalui 151 rincian kegiatan beserta indikator *output*, waktu pelaksanaan serta penanggung jawabnya. Detail kegiatan utama dan rincian kegiatan akan dijabarkan pada subbab rencana aksi RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

**2. Strategi 2: Membangun budaya kerja ASN dan meningkatkan profesionalitas ASN dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat**, sebagai strategi RB General. Strategi ini dilaksanakan melalui **9 kegiatan utama**, yaitu:

- K.19 Penataan Jabatan Fungsional
- K.20 Penguatan Manajemen Talenta ASN
- K.21 Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM ASN Bidang

Hukum dan HAM

- K.22 Rekrutmen SDM ASN Kementerian Hukum dan HAM
- K.23 Implementasi digitalisasi pada proses pengelolaan ASN Kementerian Hukum dan HAM
- K.24 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Kementerian Hukum dan HAM
- K.25 Penguatan Sistem Merit
- K.26 Pelaksanaan *Core Values* PASTI BerAKHLAK ASN Kementerian Hukum dan HAM
- K.27 Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
- K.28 Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional
- K.29 Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN

Masing-masing kegiatan utama tersebut dilaksanakan melalui 52 rincian kegiatan beserta indikator *output*, waktu pelaksanaan serta penanggungjawabnya. Detail kegiatan utama dan rincian kegiatan akan dijabarkan pada subbab rencana aksi RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

- 3. Strategi 3: Melaksanakan RB Tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah, serta pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa Kementerian Hukum dan HAM, sebagai strategi RB tematik. Strategi ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan utama dan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tema RB tematik, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:**

**a. RB tematik untuk pengentasan kemiskinan**

Kontribusi Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk Kegiatan Tematik RB dalam peningkatan investasi adalah Kegiatan Tematik (KT), harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengentasan kemiskinan. Rincian Kegiatan (RK) yang dilakukan adalah RKT.1 Rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengentasan kemiskinan yang selesai diharmonisasi dengan indikator rincian kegiatan IO.RKT.1 Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengentasan kemiskinan yang selesai diharmonisasi.

Harmonisasi dilakukan dalam memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan secara optimal dalam pengentasan kemiskinan.

**b. RB tematik untuk peningkatan investasi**

Kontribusi Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk Kegiatan Tematik RB dalam peningkatan investasi adalah:

- **KT.1 Pengelolaan layanan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha**

Layanan administrasi pendirian perseroan terbatas dan perseroan perseorangan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan kemudahan berusaha masyarakat, sehingga diharapkan dapat menjadi

stimulus dalam meningkatkan investasi.

- **KT.2 Pengelolaan layanan keimigrasian untuk menarik investor dalam mendukung peningkatan investasi**

Pengelolaan layanan keimigrasian dalam menarik minat investor, dimana kemudahan pengurusan layanan keimigrasian (keluar masuk Indonesia) diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan investor dalam memutuskan berinvestasi.

- **KT.3 Pengelolaan layanan Kekayaan Intelektual (KI) dalam meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Pengelolaan layanan Kekayaan Intelektual, dimana pemberian layanan KI akan meningkatkan perlindungan terhadap HKI sehingga diharapkan mampu meningkatkan peningkatan KI untuk komersil dan mendatangkan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

**c. RB tematik untuk Digitalisasi Administrasi Pemerintahan**

Kontribusi Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk Kegiatan RB tematik untuk tema **digitalisasi administrasi pemerintahan** adalah “**KT.4 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional**”.

Pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM memiliki kontribusi langsung terhadap digitalisasi pemerintahan. Kontribusi tersebut diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum dan HAM sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki arsitektur SPBE Kementerian Hukum dan HAM yang siap diimplementasikan pada tahun 2023. Selain itu, pelaksanaan SPBE secara khusus juga telah dimasukkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 maupun Roadmap Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023-2024, dimana terdapat 98 rincian kegiatan pelaksanaan SPBE Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023 dan 107 rincian kegiatan pelaksanaan SPBE Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2024. Sehingga pelaksanaan SPBE Kementerian Hukum dan HAM akan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik maupun digitalisasi proses bisnis serta integrasi satu data Kementerian Hukum dan HAM.

**d. RB tematik untuk Digitalisasi Administrasi Pemerintahan**

Kontribusi Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk Kegiatan RB tematik untuk tema **pemanfaatan PDN** adalah “**KT.5 Meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM**”.

Pelaksanaan RB Kemenkumham memiliki kontribusi langsung terhadap percepatan prioritas aktual Presiden, yaitu penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Kementerian Hukum dan HAM menargetkan penggunaan PDN sebesar 95% sebagai target kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan

Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024. Penggunaan PDN pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) akan dilaporkan tersendiri sebagai hasil rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan target penggunaan PDN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

### 3.4. Rencana Aksi Pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

Rencana aksi pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk penjabaran aksi pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Rencana Aksi Pelaksanaan RB Level Meso sesuai Peran Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

No	Peran Kemenkumham dalam pelaksanaan RB level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian kegiatan	Indikator <i>output</i> dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>I</b>	<b>Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi</b>									
<b>I.1</b>	<b>Penyusunan rekomendasi, pemantauan, dan peninjauan serta perancangan peraturan perundang-undangan</b>	a	Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	a.1	Jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	3	3		Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
b		Penyusunan RUU KUH acara Perdata	b.1	Jumlah RUU KUH acara Perdata	1	1		Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan	
c		Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan KUHP	c.1	Jumlah Rancangan Peraturan Pelaksanaan KUHP		4		Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan	



No	Peran Kemenkumham dalam pelaksanaan RB level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian kegiatan	Indikator <i>output</i> dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>I Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi</b>									
								Undangan	
		d Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah	d.1 Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah	4	3			Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		e Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden	e.1 Jumlah Rancangan Peraturan Presiden	5	5			Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		f Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri	f.1 Jumlah Rancangan Peraturan Menteri	20	20			Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		g Penyusunan Rancangan undang-undang Jaminan Benda Bergerak	g.1 Jumlah rancangan undang-undang Jaminan Benda Bergerak	1	1			Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

No	Peran Kemenkumham dalam pelaksanaan RB level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian kegiatan	Indikator <i>output</i> dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>I Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi</b>										
		h	Penyusunan Rancangan undang-undang Kepailitan	h.1	Jumlah rancangan undang-undang Kepailitan	1	1		Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		i	Konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan	i.1	Jumlah konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan	6	6		Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		j	Pembahasan Rancangan undang-undang di DPR	j.1	Jumlah Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR RI	5	4		Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		k	Penyusunan Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	k.1	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah		33		Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kantor Wilayah

No	Peran Kemenkumham dalam pelaksanaan RB level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian kegiatan	Indikator <i>output</i> dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>I Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi</b>										
		l	Fasilitasi perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di wilayah	l.1	Jumlah fasilitasi perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di wilayah		33		Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kantor Wilayah
		m	Penyusunan Naskah akademik Rancangan Undang-Undang inisiatif Kementerian Hukum dan HAM	m.1	Jumlah naskah akademik Rancangan Undang-Undang inisiatif Kementerian Hukum dan HAM yang disusun		3		Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional	BPHN
		n	Penyelarasan naskah akademik	n.1	Jumlah penyelarasan naskah akademik		7		Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional	BPHN
		o	Perencanaan Pembentukan Undang-undang	o.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembentukan Undang-undang		1		Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional	BPHN
		p	Penyusunan program penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah	p.1	Jumlah dokumen program penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah		1		Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional	BPHN

No	Peran Kemenkumham dalam pelaksanaan RB level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian kegiatan	Indikator <i>output</i> dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>I Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi</b>										
		q	Penyusunan program penyusunan rancangan Peraturan Presiden	q.1	Jumlah dokumen program penyusunan rancangan Peraturan Presiden		1		Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional	BPHN
		s	Penyusunan Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU	s.1	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU		60		Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	BPHN
		t	Penyusunan dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional	t.1	Dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional		1		Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	BPHN
		u	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan HAM	u.1	Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum		2		Kepala Pusat Analisis Kebijakan Penegakan, Pelayanan dan Sistem Hukum	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

No	Peran Kemenkumham dalam pelaksanaan RB level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian kegiatan	Indikator <i>output</i> dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>I Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi</b>										
		v	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan HAM	v.1	Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan HAM		2		Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan HAM	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
		w	Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola dan Pengawasan Internal	w.1	Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola dan Pengawasan Internal		2		Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola dan Pengawasan Internal	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
		x	Rekomendasi Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan HAM	x.1	Jumlah Rekomendasi Strategi Evaluasi Kebijakan		2		Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Pengelolaan Data Informasi Kebijakan Hukum dan HAM	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

No	Peran Kemenkumham dalam pelaksanaan RB level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian kegiatan	Indikator <i>output</i> dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>I Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi</b>										
		y	Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	y.1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengukuran Indeks kualitas kebijakan	1	1		1. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan HAM 2. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan HAM	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
		z	Kesekretariatan Penilaian Indeks Reformasi Hukum	z.1	Jumlah Laporan Kesekretariatan Penilaian Indeks Reformasi Hukum		1		Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan HAM	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

No	Peran Kemenkumham dalam pelaksanaan RB level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian kegiatan	Indikator <i>output</i> dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>I</b>	<b>Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi</b>									
I.2	Pembinaan peraturan perundang-undangan	a	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	a.1	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang mendapat pembinaan	200	200		Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		b	Fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada kanwil Kumham	b.1	Jumlah fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada kanwil Kumham	14	10		Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

No	Peran Kemenkumham dalam pelaksanaan RB level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian kegiatan	Indikator <i>output</i> dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>I Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi</b>										
		c	Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum	c.1	Jumlah pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum		400		Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	BPHN
I.3	Harmonisasi peraturan perundang-undangan	a	Rancangan peraturan perundang-undangan bidang Politik, Pemerintahan dan pertahanan yang selesai diharmonisasi	a.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang Politik, Pemerintahan dan pertahanan yang selesai diharmonisasi	20	20		Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		b	Rancangan peraturan perundang-undangan bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan yang selesai diharmonisasi	b.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan yang selesai diharmonisasi	20	20		Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		c	Rancangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda	c.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda dan olahraga, pariwisata,	20	20		Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I	Ditjen Peraturan Perundang-undangan



No	Peran Kemenkumham dalam pelaksanaan RB level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian kegiatan	Indikator <i>output</i> dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>I Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi</b>										
		dan olahraga, pariwisata, dan perumahan rakyat yang selesai diharmonisasi		dan perumahan rakyat yang selesai diharmonisasi						
		d Rancangan peraturan perundang-undangan bidang agama, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial yang selesai diharmonisasi	d.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang agama, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial yang selesai diharmonisasi	20	20			Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		e Rancangan peraturan perundang-undangan bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, dan penanaman modal yang selesai	e.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, dan penanaman modal yang selesai diharmonisasi	20	20			Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

No	Peran Kemenkumham dalam pelaksanaan RB level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian kegiatan	Indikator <i>output</i> dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>I Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi</b>										
			diharmonisasi							
		f	Rancangan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pembangunan nasional dan fiskal yang selesai diharmonisasi	f.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pembangunan nasional dan fiskal yang selesai diharmonisasi	20	20		Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		g	Rancangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, dan tata ruang yang selesai diharmonisasi	g.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, dan tata ruang yang selesai diharmonisasi	20	20		Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		h	Rancangan peraturan perundang-undangan bidang perindustrian, perdagangan, riset dan teknologi yang selesai diharmonisasi	h.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang perindustrian, perdagangan, riset dan teknologi yang selesai diharmonisasi	20	20		Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

No	Peran Kemenkumham dalam pelaksanaan RB level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian kegiatan	Indikator <i>output</i> dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>I Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi</b>										
I.4	Pengundangan, penerjemahan, dan publikasi	a	Peraturan perundang-undangan yang diundangkan	a.1	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diundangkan	1200	1200		Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		b	Peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	b.1	Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	1200	1200		Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		c	Peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan	c.1	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan	20	20		Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

No	Peran Kemenkumham dalam pelaksanaan RB level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian kegiatan	Indikator <i>output</i> dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>I Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi</b>											
I.5	Penyelesaian keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban termohon di MA	a	Pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi	a.1	Jumlah pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi	60	60			Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		b	Keterangan Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon di Mahkamah Agung	b.1	Jumlah keterangan Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon di Mahkamah Agung	60	60			Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
I.6	Penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan di luar pengadilan	a	Penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan	a.1	Jumlah Penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan	10	6			Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

Tabel 3.2 Rencana Aksi Pelaksanaan RB Level Meso sesuai peran Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

No	Peran Kemenkumham dalam pelaksanaan RB level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>II Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan</b>										
II.1	Konsultasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	a	Penyebarluasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan secara elektronik atau nonelektronik (e-partisipasi publik)	a.1	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang disebarluaskan secara elektronik atau nonelektronik (e-partisipasi publik)	200	200		Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		b	Menampung masukan masyarakat terhadap Rancangan Peraturan	b.1	Jumlah masukan masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	200	200		Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

No	Peran Kemenkumham dalam pelaksanaan RB level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>II</b>	<b>Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan</b>								
		Perundang-Undangan						undangan	
		c Pembahasan dan tindak lanjut masukan masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	c.1	Jumlah masukan masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibahas dan ditindaklanjuti	200	200		Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

Tabel 3. 3 Rencana Aksi Pelaksanaan RB General Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi										
K.1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	RK.1	Asement organisasi berbasis kinerja yang <i>right sizing</i> dengan mengacu pada prinsip <i>structure follow strategy</i>	IO.1.1	Jumlah asesmen dan evaluasi organisasi yang dilakukan (kegiatan)	1	-			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
		RK.2	Menyusun naskah akademik restrukturisasi Kementerian Hukum dan HAM	IO.2.1	Jumlah naskah akademik restrukturisasi Kementerian Hukum dan HAM (nasmik)	1	-			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
		RK.3	Menyusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM	IO.3.1	Jumlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM (Dokumen Permenkumham)	1	-			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>											
		RK.4	Menyusun uraian tugas untuk setiap jabatan pada struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM	IO.4.1	Jumlah dokumen analisa jabatan untuk setiap jabatan pada struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM (dokumen)	1	.			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
		RK.5	Implementasi struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM pasca penyederhanaan	IO.5.1	Jumlah laporan implementasi struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM pasca penyederhanaan (laporan)	1	-			Kepala Biro Kepegawaian, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Unit Eselon I
<b>K.2</b>	<b>Penyelarasan Proses bisnis dan SOP</b>	RK.6	Evaluasi Standar Operasi Prosedur	IO.6.1	Jumlah laporan Evaluasi Standar Operasi Prosedur	2	2			Kepala Biro Perencanaan	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT



No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>SS.1</b>	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.7	Evaluasi Proses Bisnis Level II	IO.7.1	Jumlah laporan evaluasi proses bisnis	1	-			Kepala Biro Perencanaan	Seluruh Unit Eselon I
		RK.8	Penyusunan Pola Mekanisme Kerja	IO.8.1	Jumlah dokumen pola mekanisme kerja	1	-			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
		RK.9	Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi sarana kerja Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM	IO.9.1	Jumlah laporan penyusunan dan Evaluasi Standardisasi sarana kerja Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM	1	1			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
<b>S.2</b>	<b>Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik</b>										
<b>K.3</b>	<b>Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN</b>	RK.10	Menyusun kajian kebijakan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IO.10.1	Jumlah Naskah kajian kebijakan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (naskah kajian)	1	-			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>									
		RK.11	Menyusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang sistem kerja dengan model fleksibel di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IO.11.1	Jumlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang sistem kerja dengan model fleksibel di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang telah disahkan (Permenkumham)	-	1		Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
		RK.12	Implementasi Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IO.12.1	Jumlah Laporan pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Laporan pelaksanaan)	-	1		Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Unit Eselon I

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.13	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IO.13.1	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Laporan Monev)	-	1		Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
<b>S.3 Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional</b>										
K.4	<b>Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional (note: berdasarkan roadmap SPBE Kemenkumham tahun 2023-2024)</b>	RK.14	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan	IO.14.1	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan yang terlaksana (Kegiatan)	29	28		Kepala Pusat Data dan Informasi	PUSDATIN
		RK.15	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal	IO.15.1	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal yang terlaksana (Kegiatan)	2	5		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.1</b>	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.16	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi	IO.16.1	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi yang terlaksana (Kegiatan)	10	7			Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	Ditjen Imigrasi
		RK.17	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	IO.17.1	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang terlaksana (Kegiatan)	4	6			Direktur Teknologi Informasi	Ditjen AHU
		RK.18	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Pemasarakatan	IO.18.1	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang terlaksana (Kegiatan)	14	27			Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama	Ditjen Pemasarakatan

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.19	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	IO.19.1	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang terlaksana (Kegiatan)	11	8			Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Ditjen Kekayaan Intelektual
		RK.20	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	IO.20.1	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang terlaksana (Kegiatan)	3	5			Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.21	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	IO.21.1	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang terlaksana (Kegiatan)	8	8			Direktur Fasilitas dan Informasi Hak Asasi Manusia	Ditjen HAM

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.1</b>	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.22	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Badan Pembinaan Hukum Nasional	IO.22.1	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang terlaksana (Kegiatan)	6	8			Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	BPHN
		RK.23	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	IO.23.1	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang terlaksana (Kegiatan)	5	2			Pusat Strategi Kebijakan Evaluasi dan Pengelolaan Data Informasi Kebijakan hukum dan HAM	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
		RK.24	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	IO.24.1	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang terlaksana (Kegiatan)	5	4			Kepala Pusat Penilaian Kompetensi	BPSDM Hukum dan HAM

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>											
		RK.25	Pembentukan Tim Tata Kelola SPBE	IO.25.1	Jumlah laporan pembentukan tim tata kelola SPBE	1	1			Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktur Teknologi Informasi, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama, Direktur Teknologi Informasi Kekayaan	Seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel								
									Intelektual, "Direktur Pengundanga n, Penerjemahan , dan Publikasi Peraturan Perundang- undangan, Direktur Fasilitasi dan Informasi Hak Asasi Manusia, Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pusat Strategi Kebijakan



No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel								
									Evaluasi dan Pengelolaan Data Informasi Kebijakan hukum dan HAM, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi.

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.26	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE	IO.26.1	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE	2	2			PUSDATIN	Sekretariat Jenderal
S.4	<b>Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>										
K.5	<b>Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi</b>	RK.27	Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (standar kinerja berbasis logic model sesuai ketentuan PermenPANRB nomor 89 tahun 2021)	IO.27.1	Jumlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Rencana Strategis Perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 yang telah diundangkan (Permenkumham)	1	-			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
		RK.28	Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (standar kinerja berbasis logic model sesuai ketentuan PermenPANRB	IO.28.1	Jumlah Keputusan Sekjen/Keputusan Itjen/Keputusan Ditjen/Keputusan Badan tentang Rencana Strategis Perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun	1	1			Kepala Biro Perencanaan, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan,	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
			nomor 89 tahun 2021)		2020-2024					Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	
		RK.29	Penyusunan Draft Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025-2029	IO.29.1	Jumlah Draft Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025-2029	-	1			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
		RK.30	Penyusunan pedoman pengukuran kinerja Kemenkumham berbasis digital	IO.30.1	Jumlah pedoman pengukuran kinerja Kemenkumham berbasis digital (dokumen)	-	1			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>											
		RK.31	Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian dengan agenda: - evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 bulan (12 laporan) - perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bulan (12 laporan) - penguatan integritas organisasi (1 laporan)	IO.31.1	Jumlah Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)	25	25			Seluruh Kepala Biro, Kepala Pusat data dan teknologi informasi, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	Seluruh Unit Eselon I

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.32	Pengintegrasian aplikasi E-Performance dengan ASIKAN atau e-planning	IO.32.1	Jumlah laporan hasil Pengintegrasian aplikasi E-Performance dengan ASIKAN atau e-planning (laporan)	-	2		Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Pusat Data dan Informasi	Sekretariat Jenderal
		RK.33	Monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui (e-monev, SMART, e-tarja dan e-Performance)	IO.33.1	Jumlah laporan hasil Monev pelaporan kinerja dan keuangan (laporan)	4	4		Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
									administrasi di UPT	
		RK.34 Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja, dan Target Kinerja	IO.34.1 Jumlah Laporan Monitoring dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja (laporan)	4	4				Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>									
		RK.35	Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kementerian Hukum dan HAM	IO.35.1	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kementerian Hukum dan HAM (laporan)	1			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
		RK.36	Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM	IO.36.1	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM (laporan)	1	1		Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
		RK.37	Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Tahun 2022	IO.37.1	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Tahun 2022	1	1		Seluruh Kepala Biro, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal,	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
									Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	
		RK.38	Publikasi Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	IO.38.1	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang dipublikasikan pada website Kemenkumham	3	3		Seluruh Kepala Biro, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT



No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
									administrasi di UPT		
		RK.39	Evaluasi internal implementasi SAKP Kemenkumham	IO.39.1	Jumlah evaluasi internal terhadap pelaksanaan SAKP Kemenkumham	4	4			Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V, VI	Inspektorat Jenderal
		RK.40	Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai eksternal SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022	IO.40.1	Jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai eksternal	1				Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
		RK.41	Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai eksternal SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023	IO.41.1	Jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai eksternal		1			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)										
K.6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	RK.42	Sosialisasi/publikasi 6 komponen service delivery dalam dokumen standar pelayanan	IO.42.1	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi/publikasi 6 komponen service delivery dalam dokumen standar pelayanan	1	1			Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT
		RK.43	Publikasi maklumat pelayanan	IO.43.1	Jumlah laporan publikasi maklumat pelayanan	1	1			Kepala Biro Perencanaan, Kepala	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
									Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	dan UPT
		RK.44	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat	IO.44.1	Jumlah laporan publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1	1		Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
									Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	
		RK.45	Internalisasi standar pelayanan	IO.45.1	Jumlah laporan internalisasi standar pelayanan	1	1		Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
								Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT		
		RK.46	Pendampingan penyusunan dokumen standar pelayanan publik	IO.46.1	Jumlah laporan pendampingan penyusunan dokumen standar pelayanan publik	1	1		Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
		RK.47	Penyusunan dan evaluasi dokumen standar pelayanan publik	IO.47.1	Jumlah dokumen standar pelayanan dan laporan evaluasi	2	2		Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris	Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel								
								Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	
		RK.48	Publikasi dokumen standar layanan melalui Website	IO.48.1	Jumlah laporan publikasi dokumen standar layanan melalui Website	1	1	Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi	Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
									dan seluruh fungsi administrasi di UPT	
		RK.49 Penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR	IO.49.1	Jumlah laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui E-LAPOR	2	2			Kepala Biro Hukerma, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
		RK.50	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	IO.50.1	Jumlah laporan Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik	2	2		Seluruh Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sekretaris Direktorat Jenderal KI, Sekretaris Direktorat Jenderal AHU, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Sekretaris BPHN	Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah dan UPT



No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.51	Monitoring dan Pelaksanaan Revisi Anggaran melalui aplikasi Re-One dan penyelesaian kerugian negara melalui aplikasi SI-PKN	IO.51.1	Jumlah laporan penyelenggaraan aplikasi dan rekapitulasi layanan	2	2		Kepala Biro Keuangan	Sekretariat Jenderal
		RK.52	Pemanfaatan Pelayanan Publik Digital melalui website dan aplikasi mobile PPID	IO.52.1	Jumlah laporan pemanfaatan Pelayanan Publik Digital melalui website dan aplikasi mobile PPID	2	2		Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Jenderal
		RK.53	Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi (Website, Media Sosial, Pamflet, Brosur, Banner, dll)	IO.53.1	Jumlah laporan pelaksanaan Kampanye Publik	4	4		Kepala Biro Umum, Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sekretaris	Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
									Direktorat Jenderal KI, Sekretaris Direktorat Jenderal AHU, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Sekretaris BPHN	
		RK.54	Integrasi website PPID (menggunakan SPLP)	IO.54.1	Jumlah laporan integrasi website PPID (menggunakan SPLP)	-	1		Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Jenderal
<b>S.6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan</b>										
K.7	<b>Pembangunan Zona Integritas di unit kerja</b>	RK.55	Pengajuan unit kerja sebagai unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada TPN	IO.55.1	Jumlah laporan pengajuan unit kerja sebagai unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada TPN	1	1		Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>											
	(RK disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB no 90 tahun 2021)	RK.56	Pencanangan Zona Integritas	IO.56.1	Jumlah laporan pencanangan Zona Integritas (ZI)	1	1			Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah dan UPT
		RK.57	Penetapan unit kerja WBK WBBM	IO.57.1	Jumlah laporan penetapan unit kerja WBK WBBM	1	1			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
		RK.58	Pembangunan unit kerja WBK/WBBM	IO.58.1	Jumlah laporan pembangunan unit kerja WBK/WBBM	4	4		Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah dan UPT
		RK.59	Evaluasi pembangunan Zona Integritas	IO.59.1	Jumlah evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI)	1	1		Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V, VI	Inspektorat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
K.8	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	RK.60	Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IO.60.1	Jumlah laporan penyelenggaraan SPIP Kementerian Hukum dan HAM terkait Penetapan Tujuan		1			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
				IO.60.2	Jumlah laporan penyelenggaraan SPIP Kementerian Hukum dan HAM terkait Struktur dan Proses	1	1			Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V, VI	Inspektorat Jenderal
				IO.60.3	Jumlah laporan penyelenggaraan SPIP Kementerian Hukum dan HAM terkait Pencapaian Tujuan		1			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
		RK.61	Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai eksternal SPIP	IO.61.1	Jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai eksternal SPIP	1	1			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.62	Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai internal SPIP 2022	IO.62.1	Jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai internal SPIP 2022 (berdasarkan berita acara)	1			Kepala Biro Perencanaan, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal.	Seluruh Unit Eselon I
		RK.63	Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai internal SPIP 2023	IO.63.1	Jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai internal SPIP 2023	1			Kepala Biro Perencanaan, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi	Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Banten dan D.I. Yogyakarta

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
									Kanwil Banten dan D.I. Yogyakarta	
		RK.64 Pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IO.64.1	Jumlah dokumen penerapan penanganan risiko Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Identifikasi risiko, evaluasi risiko, rencana penanganan risiko)	1	1			Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
			IO.64.2	Jumlah laporan pelaksanaan maturitas manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1	1			Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V, VI	Inspektorat Jenderal
			IO.64.3	Jumlah laporan pelaksanaan kapabilitas manajemen risiko di lingkunganKemenkumham	1	1			Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di	Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah dan UPT



No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel								
								UPT	
			IO.64.4	Jumlah kegiatan pemantauan penanganan risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2	2		Seluruh Kepala Biro, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
			IO.64.5	Jumlah kegiatan evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada satuan kerja	1	1			Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V, VI	Inspektorat Jenderal
		RK.65 Pelaksanaan pengendalian korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IO.65.1	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapabilitas pengelolaan risiko korupsi	1	1			Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V, VI	Inspektorat Jenderal
			IO.65.2	Jumlah kegiatan penerapan strategi pencegahan risiko korupsi	1	1			Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V, VI	Inspektorat Jenderal
			IO.65.3	Jumlah penanganan kejadian korupsi yang dilaksanakan	1	1			Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V, VI	Inspektorat Jenderal
		RK. 66 Pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan	IO.66.1	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM APIP	2	2			Sekretariat Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
		HAM	IO.66.2	Jumlah pelaksanaan kegiatan praktik profesional APIP	2	2			Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah II	Inspektorat Jenderal
			IO.66.3	Jumlah pelaksanaan kegiatan akuntabilitas dan manajemen kinerja APIP	4	4			Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah III	Inspektorat Jenderal
			IO.66.4	Jumlah pelaksanaan kegiatan Budaya dan Hubungan Organisasi APIP	3	3			Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah IV	Inspektorat Jenderal
			IO.66.5	Jumlah pelaksanaan kegiatan struktur tata kelola APIP	3	3			Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah V	Inspektorat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
			IO.66.6	Jumlah pelaksanaan kegiatan optimasi peran dan layanan APiP	4	4			Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah VI	Inspektorat Jenderal
		RK.67 Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit eksternal dan internal	IO.67.1	Jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit eksternal terhadap Kementerian Hukum dan HAM	1	1			Kepala Biro Keuangan, Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V, VI, seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel								
								fungsi administrasi di UPT	
			IO.67.2	Jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut audit internal terhadap Kementerian Hukum dan HAM	1	1		Kepala Biro Keuangan, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
									administrasi di UPT		
		RK.68	Pembentukan Tim Satgas tentang penyelenggaraan SPIP	IO.68.1	Jumlah laporan pembentukan Tim Satgas tentang penyelenggaraan SPIP	1	1			Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kantor Wilayah dan UPT	Seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT
		RK.69	Pembentukan tim penyusun pedoman pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IO.69.1	Jumlah laporan pembentukan tim penyusun pedoman pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1				Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.1</b>	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>									
		RK.70	Penyusunan pedoman pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IO.70.1	Jumlah laporan penyusunan pedoman pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
<b>K.9</b>	<b>Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</b>	RK.71	Monitoring dan evaluasi pengaduan E-LAPOR yang ditindaklanjuti secara terpadu dan tuntas	IO.71.1	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengaduan yang masuk ke E-LAPOR dan telah diselesaikan secara tuntas	2	2		Biro Humas, Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Jenderal
		RK.72	Pembinaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pejabat penghubung aplikasi LAPOR	IO.72.1	Jumlah laporan pembinaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pejabat penghubung aplikasi LAPOR	3	3		Biro Humas, Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>											
K.1 0	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	RK.73	Peningkatan aktivitas Whistle Blowing System (WBS) Kementerian Hukum dan HAM	IO.73.1	Jumlah laporan aktivitas Whistle Blowing System (WBS) Kementerian Hukum dan HAM	1	1			Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V, VI	Inspektorat Jenderal
		RK.74	Sosialisasi pencegahan korupsi secara masif di Satker pusat hingga Satker kewilayahan	IO.74.1	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi pencegahan korupsi secara masif di Satker pusat hingga Satker kewilayahan	1	1			Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V, VI	Inspektorat Jenderal
		RK.75	Membangun koordinasi dan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IO.75.1	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1	1			Biro Humas, Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Jenderal



No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
		RK.76	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	IO.76.1	Jumlah laporan pembentukan Tim Benturan Kepentingan	1	1			Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	Seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>											
		RK.77	Sosialisasi Benturan Kepentingan	IO.77.1	Jumlah laporan Sosialisasi Benturan Kepentingan	1	1			Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	Seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT
		RK.78	Evaluasi dan tindak lanjut benturan kepentingan	IO.78.1	Jumlah laporan Evaluasi dan tindak lanjut benturan kepentingan	4	4			Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Pusdatin,	Seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
									Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	dan UPT
K11	Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	RK.79	Monitoring dan evaluasi PPID	IO.79.1	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi PPID	2	2		Biro Humas, Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Jenderal
		RK.80	Pengembangan aplikasi seluler PPID	IO.80.1	Jumlah laporan Pengembangan aplikasi seluler PPID	1	1		Biro Humas, Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi										
K.12	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	RK.81	Menyusun rekomendasi strategi kebijakan bidang Hukum dan HAM	IO.81.1	Jumlah rekomendasi strategi kebijakan bidang Hukum dan HAM	8	8			1. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan dan Hak Asasi Manusia 2. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kepala Pusat	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
									Strategi Kebijakan Tata Kelola dan Pengawasan Internal 4. Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Pengelolaan Data Informasi kebijakan Hukum dan HAM	
K.13	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	RK.82	Identifikasi dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan yang berlaku di unit kerja masing-	IO.82.1	Jumlah matriks hasil identifikasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan/kebijakan	1	1		Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusdatin, Seluruh	Seluruh Unit Eselon I

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel											
			masing								Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	
		RK.83	Mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	IO.83.1	Jumlah laporan reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan	4	4				Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>									
		RK.84	Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	IO.84.1	Jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	3	3		Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.85	Penyusunan RUU KUH acara Perdata	IO.85.1	Jumlah RUU KUH acara Perdata	1	1		Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.86	Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan KUHP	IO.86.1	Jumlah Rancangan Peraturan Pelaksanaan KUHP		4		Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
		RK.87	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah	IO.87.1	Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah	4	3		Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.88	Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden	IO.88.1	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden	5	5		Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.89	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri	IO.89.1	Jumlah Rancangan Peraturan Menteri	20	20		Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan



No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
		RK.90	Penyusunan Rancangan undang-undang Jaminan Benda Bergerak	IO.90.1	Jumlah rancangan undang-undang Jaminan Benda Bergerak	1	1			Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.91	Penyusunan Rancangan undang-undang Kepailitan	IO.91.1	Jumlah rancangan undang-undang Kepailitan	1	1			Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.92	Konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan	IO.92.1	Jumlah konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan	6	6			Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.93	Pembahasan Rancangan undang-undang di DPR	IO.93.1	Jumlah Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR RI	5	4		Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.94	Penyusunan Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	IO.94.1	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah		33		Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kantor Wilayah
		RK.95	Fasilitasi perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di wilayah	IO.95.1	Jumlah fasilitasi perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di wilayah		33		Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kantor Wilayah
		RK.96	Penyusunan Naskah akademik Rancangan Undang-Undang inisiatif Kementerian Hukum dan HAM	IO.96.1	Jumlah naskah akademik Rancangan Undang-Undang inisiatif Kementerian Hukum dan HAM yang disusun		3		Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional	BPHN

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.97	Penyelarasan naskah akademik	IO.97.1	Jumlah penyelarasan naskah akademik	7			Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional	BPHN
		RK.98	Perencanaan Pembentukan Undang-undang	IO.98.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembentukan Undang-undang	1			Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional	BPHN
		RK.99	Penyusunan program penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah	IO.99.1	Jumlah dokumen program penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah	1			Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional	BPHN
		RK.100	Penyusunan program penyusunan rancangan Peraturan Presiden	IO.100.1	Jumlah dokumen program penyusunan rancangan Peraturan Presiden	1			Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional	BPHN

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
		RK.101	Fasilitasi perencanaan hukum nasional kementerian/lembaga	IO.101.1	Jumlah fasilitasi perencanaan hukum nasional kementerian/lembaga		10			Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional	BPHN
		RK.102	Penyusunan Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU	IO.102.1	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU		60			Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	BPHN
		RK.103	Penyusunan dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional	IO.103.1	Dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional		1			Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	BPHN

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
		RK.104	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan HAM	IO.104.1	Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan HAM		2		Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan HAM	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
		RK.105	Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan HAM	IO.105.1	Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan HAM		2		Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan HAM	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
		RK.106	Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola dan Pengawasan Internal	IO.106.1	Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola dan Pengawasan Internal		2		Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola dan Pengawasan Internal	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
		RK.107	Rekomendasi Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan HAM	IO.107.1	Jumlah Rekomendasi Strategi Evaluasi Kebijakan		2		Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Pengelolaan Data Informasi Kebijakan Hukum dan HAM	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
		RK.108	Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	IO.108.1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengukuran Indeks kualitas kebijakan	1	1		1. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan HAM 2. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>									
								Hukum dan HAM	
		RK.109 Kesekretariatan Penilaian Indeks Reformasi Hukum	IO.109.1 Jumlah Laporan Kesekretariatan Penilaian Indeks Reformasi Hukum	1	1			Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan HAM	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM
		RK.110 Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- Undangan	IO.110.1 Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang mendapat pembinaan	200	200			Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- undangan	Ditjen Peraturan Perundang- undangan

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
		RK.111	Fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada kanwil Kumham	IO.111.1	Jumlah fasilitasi perancangan Peraturan Daerah pada kanwil Kumham	14	10		Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.112	Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum	IO.112.1	Jumlah pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum		400		Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	BPHN



No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.1</b>	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.113	Rancangan peraturan perundang-undangan bidang Politik, Pemerintahan dan pertahanan yang selesai diharmonisasi	IO.113.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang Politik, Pemerintahan dan pertahanan yang selesai diharmonisasi	20	20			Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.114	Rancangan peraturan perundang-undangan bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan yang selesai diharmonisasi	IO.114.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan yang selesai diharmonisasi	20	20			Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.115	Rancangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda dan olahraga, pariwisata, dan perumahan rakyat yang selesai diharmonisasi	IO.115.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, pemuda dan olahraga, pariwisata, dan perumahan rakyat yang selesai diharmonisasi	20	20			Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.1</b>	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.116	Rancangan peraturan perundang-undangan bidang agama, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial yang selesai diharmonisasi	IO.116.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang agama, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial yang selesai diharmonisasi	20	20			Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.117	Rancangan peraturan perundang-undangan bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, dan penanaman modal yang selesai diharmonisasi	IO.117.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, dan penanaman modal yang selesai diharmonisasi	20	20			Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>											
		RK.118	Rancangan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pembangunan nasional dan fiskal yang selesai diharmonisasi	IO.118.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pembangunan nasional dan fiskal yang selesai diharmonisasi	20	20			Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.119	Rancangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, dan tata ruang yang selesai diharmonisasi	IO.119.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, dan tata ruang yang selesai diharmonisasi	20	20			Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.120	Rancangan peraturan perundang-undangan bidang perindustrian, perdagangan, riset dan teknologi yang selesai diharmonisasi	IO.120.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang perindustrian, perdagangan, riset dan teknologi yang selesai diharmonisasi	20	20			Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.121	Peraturan perundang-undangan yang diundangkan	IO.121.1	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diundangkan	1200	1200		Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.122	Peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	IO.122.1	Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	1200	1200		Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.123	Peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan	IO.123.1	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan	20	20		Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.124	Pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi	IO.124.1	Jumlah pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi	60	60		Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.125	Keterangan Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon di Mahkamah Agung	IO.125.1	Jumlah keterangan Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon di Mahkamah Agung	60	60		Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
		RK.126	Penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan	IO.126.1	Jumlah Penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan		6		Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
<b>S.8 Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral</b>										

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>											
K.14	<b>Pelaksanaan Arsip Digital</b>  <b>*(Tahapan disusun sesuai Per ANRI nomor 6 tahun 2021)</b>	RK.127	Pembuatan dan penerimaan Arsip Elektronik	IO.127.1	Jumlah pelaksanaan pembuatan dan penerimaan Arsip Elektronik	1	1			Kepala Biro Umum	Sekretariat Jenderal
		RK.128	Penggunaan Arsip Elektronik	IO.128.1	Jumlah pelaksanaan penggunaan Arsip Elektronik	1	1			Kepala Biro Umum	Sekretariat Jenderal
		RK.129	Penyimpanan Arsip Elektronik	IO.129.1	Jumlah pelaksanaan penyimpanan Arsip Elektronik	1	1			Kepala Biro Umum	Sekretariat Jenderal
		RK.130	Pemeliharaan dan alih media Arsip Elektronik	IO.130.1	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan dan alih media Arsip Elektronik	1	1			Kepala Biro Umum	Sekretariat Jenderal
		RK.131	Pemeliharaan dan alih media Arsip Elektronik	IO.131.1	Jumlah pelaksanaan penyusutan Arsip Elektronik	1	1			Kepala Biro Umum	Sekretariat Jenderal
		RK.132	Akuisisi Arsip Elektronik	IO.132.1	Jumlah pelaksanaan akuisisi Arsip Elektronik	1	1			Kepala Biro Umum	Sekretariat Jenderal
		RK.133	Deskripsi dan pengolahan Arsip Elektronik	IO.133.1	Jumlah pelaksanaan deskripsi dan pengolahan Arsip Elektronik	1	1			Kepala Biro Umum	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>SS.1</b>	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.134	Preservasi Digital	IO.134.1	Jumlah pelaksanaan preservasi Digital	1	1			Kepala Biro Umum	Sekretariat Jenderal
		RK.135	Akses dan pemanfaatan Arsip Elektronik	IO.135.1	Jumlah pelaksanaan pemberian akses dan pemanfaatan Arsip Elektronik	1	1			Kepala Biro Umum	Sekretariat Jenderal
		RK.136	Pembentukan tim pengawasan kearsipan	IO.136.1	Jumlah laporan pembentukan tim pengawasan kearsipan	1	1			Kepala Biro Umum	Seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT
		RK.137	Pelaksanaan pengawasan kearsipan dilingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	IO.137.1	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan kearsipan dilingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	4	4			Kepala Biro Umum	Seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT
		RK.138	Pembentukan tim pembinaan kearsipan	IO.138.1	Jumlah laporan pembentukan tim pembinaan kearsipan	1	1			Kepala Biro Umum	Seluruh Unit Eselon I

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>SS.1</b>	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.139	Pembinaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kearsipan	IO.139.1	Jumlah laporan pembinaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kearsipan	1	1			Kepala Biro Umum	Seluruh Unit Eselon I
		RK.140	pelaksanaan tata kelola kearsipan meliputi pengelolaan arsip aktif	IO.140.1	Jumlah laporan pelaksanaan tata kelola kearsipan meliputi pengelolaan arsip aktif	1	1			Kepala Biro Umum	Seluruh Unit Eselon I
		RK.141	pelaksanaan tata kelola kearsipan meliputi pengelolaan arsip inaktif	IO.141.1	Jumlah laporan pelaksanaan tata kelola kearsipan meliputi pengelolaan arsip inaktif	1	1			Kepala Biro Umum	Seluruh Unit Eselon I
		RK.142	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kearsipan	IO.142.1	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kearsipan	1	1			Kepala Biro Umum	Seluruh Unit Eselon I
<b>K15</b>	<b>Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari</b>	RK.143	Pembentukan tim pelaksana alihmedia arsip dilingkungan kementerian hukum dan ham	IO.143.1	Jumlah laporan pembentukan tim pelaksana alihmedia arsip dilingkungan kementerian hukum dan ham	1	1			Kepala Biro Umum	Seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT



No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>SS.1</b>	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
	manual ke digital)	RK.144	Alih media arsip manual dengan jra berketerangan permanen	IO.144.1	Jumlah Alih media arsip manual dengan jra berketerangan permanen	4	4			Kepala Biro Umum	Seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT
<b>K.16</b>	<b>Pelaksanaan Data Statistik Sektoral</b>	RK.145	Pengelolaan data statistik bidang Hukum dan HAM terintegrasi	IO.145.1	Jumlah pengelolaan data statistik bidang Hukum dan HAM terintegrasi	1	1			Kepala Pusdatin (wali data Kemenkumham), Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Unit Eselon I

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.146	Penyajian dan publikasi data statistik bidang Hukum dan HAM	IO.146.1	Jumlah laporan penyajian dan publikasi data statistik bidang Hukum dan HAM	1	1		Kepala Pusdatin (wali data Kemenkumham), Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Unit Eselon I
<b>S.9 Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset</b>										
K.17	<b>Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>	RK.147	Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kemenkumham	IO.147.1	Jumlah laporan pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kemenkumham	1	1		Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal
		RK.148	Peningkatan kompetensi pengelola barang dan jasa	IO.148.1	Jumlah laporan pelaksanaan kompetensi pengelola barang dan jasa	1	1		Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.149	Pengawasan terhadap pengelolaan barang dan jasa	IO.149.1	Jumlah laporan pengawasan terhadap pengelolaan barang dan jasa	1	1		Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal
		RK.150	Pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa melalui Aplikasi Sipastiku: 1. E-Verifikasi 2. Laporan Progress Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	IO.150.1	Jumlah pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa melalui Aplikasi Sipastiku: 1. E-Verifikasi 2. Laporan Progress Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	2	2		Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal
		RK.151	Membentuk Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IO.151.1	Jumlah pelaksanaan pembentukan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2	2		Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal
<b>K.18</b>	<b>Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset</b>	RK.152	Penyusunan rencana kebutuhan barang negara tahun 2024	IO.152.1	Jumlah rencana kebutuhan barang negara tahun 2024	1	1		Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.153	Pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN	IO.153.1	Pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN	4	4			Kepala Biro BMN Sekretariat Jenderal
		RK.154	Penyusunan usulan penetapan status penggunaan BMN	IO.154.1	Penyusunan usulan penetapan status penggunaan BMN	2	2			Kepala Biro BMN, Seluruh Sekretaris Unit Eelon I, Kepala Divisi Administrasi, dan Kepala UPT Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT
		RK.155	Pelaksanaan pemanfaatan BMN	IO.155.1	Pelaksanaan pemanfaatan BMN	1	1			Kepala Biro BMN Sekretariat Jenderal
		RK.156	Pengelolaan rumah negara	IO.156.1	Pengelolaan rumah negara	1	1			Kepala Biro BMN Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
		RK.157	Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	IO.157.1	Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	1	1			Kepala Biro BMN, Seluruh Sekretaris Unit Eelon I, Kepala Divisi Administrasi, dan Kepala UPT	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT
		RK.158	Pemutakhiran data tindak lanjut persetujuan pemindahtanganan BMN	IO.158.1	Pemutakhiran data tindak lanjut persetujuan pemindahtanganan BMN	2	2			Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal
		RK.159	Pemutakhiran data tindak lanjut persetujuan pemusnahan dan penghapusan BMN	IO.159.1	Pemutakhiran data tindak lanjut persetujuan pemusnahan dan penghapusan BMN	2	2			Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal
		RK.160	Realisasi PNBPN dari Pemindahtanganan BMN	IO.160.1	Realisasi PNBPN dari Pemindahtanganan BMN	2	2			Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>SS.1</b>	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>										
		RK.161	Pembinaan penatausahaan BMN	IO.161.1	Pembinaan penatausahaan BMN	2	2			Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal
		RK.162	Pengawasan dan pengendalian BMN	IO.162.1	Pengawasan dan pengendalian BMN	2	2			Kepala Biro BMN, Seluruh Sekretaris Unit Eelon I, Kepala Divisi Administrasi, dan Kepala UPT	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT
		RK.163	Penyusunan Laporan Barang Pengguna kementerian Hukum dan HAM TA. 2022 Unaudited	IO.163.1	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Kementerian Hukum dan Ham TA. 2022 Audited	1				Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal
		RK.164	Penyusunan Laporan Barang Pengguna kementerian Hukum dan HAM TA. 2023 Unaudited	IO.164.1	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Kementerian Hukum dan Ham TA. 2023 Audited		1			Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	<b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel</b>									
		RK.165	Penyusunan Laporan Barang Pengguna kementerian Hukum dan HAM TA. 2022 Audited	IO.165.1	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Kementerian Hukum dan Ham TA. 2022 Unaudited	1			Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal
		RK.166	Penyusunan Laporan Barang Pengguna kementerian Hukum dan HAM TA. 2023 Audited	IO.166.1	Penyusunan Laporan Barang Pengguna Kementerian Hukum dan Ham TA. 2023 Unaudited		1		Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal
		RK.167	Penyusunan Laporan BMN Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA. 2023	IO.167.1	Penyusunan Laporan BMN Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA. 2023	1			Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal
		RK.168	Penyusunan Laporan BMN Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA. 2024	IO.168.1	Penyusunan Laporan BMN Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA. 2024		1		Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal
		RK.169	Laporan pelaksanaan pengelolaan BMN (Rumah Negara, Tanah Negara, dan Kendaraan Bermotor)	IO.169.1	Laporan pelaksanaan pengelolaan BMN (Rumah Negara, Tanah Negara, dan Kendaraan Bermotor)	2	2		Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
		RK.170	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2022 Unaudited	IO.170.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2022 Unaudited	1			Kepala Biro Keuangan, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala UPT	Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah dan UPT
		RK.171	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2023 Unaudited	IO.171.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2023 Unaudited		1		Kepala Biro Keuangan, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala UPT	Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah dan UPT
		RK.172	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Keuangan TA. 2022 Audited	IO.172.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Keuangan TA. 2022 Audited	1			Kepala Biro Keuangan, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala UPT	Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah dan UPT



No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
		RK.173	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Keuangan TA. 2023 Audited	IO.173.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Keuangan TA. 2023 Audited		1		Kepala Biro Keuangan, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala UPT	Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah dan UPT
		RK.174	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA. 2023	IO.174.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA. 2023		1		Kepala Biro Keuangan, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala UPT	Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah dan UPT
		RK.175	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA. 2024	IO.175.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA. 2024		1		Kepala Biro Keuangan, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala UPT	Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
		RK.176	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III 2023	IO.176.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III 2023	1			Kepala Biro Keuangan, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala UPT	Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah dan UPT
		RK.177	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III 2024	IO.177.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III 2024		1		Kepala Biro Keuangan, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala UPT	Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah dan UPT
		RK.178	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran	IO.178.1	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Realisasi Anggaran	4	4		Kepala Biro Keuangan, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan,	Seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel									
								Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	
		RK.179 Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi revidi tim pemeriksa internal (pemeriksaan keuangan)	IO.179.1 Jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi revidi tim pemeriksa internal (pemeriksaan keuangan)	1	1			Kepala Biro Keuangan, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi	Seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel								
									Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT

Tabel 3.3 Rencana Aksi Pelaksanaan RB General Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional										
S.10	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional										
K.19	Penataan Jabatan Fungsional	RK.180	Pemetaan jabatan fungsional ASN Kemenkumham pasca transformasi	IO.180.1	Jumlah dokumen peta jabatan fungsional ASN Kemenkumham	1	-			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
		RK.181	Analisis Beban Kerja (ABK) jabatan fungsional ASN Kemenkumham	IO.181.1	Jumlah dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) jabatan fungsional ASN Kemenkumham	1	1			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
		RK.182	Evaluasi jabatan fungsional ASN Kemenkumham dalam menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan fungsional	IO.182.1	Jumlah dokumen Evaluasi jabatan fungsional ASN Kemenkumham dalam menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan fungsional	-	1			Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.2</b>	<b>Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>										
		RK.183	Menyusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IO.183.1	Jumlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
		RK.184	Rekrutmen dan seleksi jabatan fungsional berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan jabatan fungsional	IO.184.1	Jumlah laporan pelaksanaan Rekrutmen dan seleksi jabatan fungsional berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan jabatan fungsional	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
<b>S.11</b>	<b>Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien</b>										
<b>K.20</b>	<b>Penguatan Manajemen Talenta ASN</b>	RK.185	Akuisisi talenta	IO.185.1	Jumlah laporan pelaksanaan akuisisi talenta	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.2</b>	<b>Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>										
*(Tahapan disusun berdasarkan Permenpan RB no 3 tahun 2020)  --> <b>Permenkumham 8 tahun 2020/2021 manajemen karir PNS di lingkungan Kumham</b>	RK.186	Pengembangan talenta	IO.186.1	Jumlah laporan pelaksanaan pengembangan talenta	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal	
	RK.187	Retensi talenta	IO.187.1	Jumlah laporan pelaksanaan retensi talenta	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal	
	RK.188	Penempatan talenta	IO.188.1	Jumlah laporan pelaksanaan penempatan talenta	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal	
	RK.189	Pemantauan dan evaluasi	IO.189.1	Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal	
	RK.190	Penyempurnaan standar kompetensi jabatan (SKJ)	IO.190.1	Jumlah laporan penyempurnaan standar kompetensi jabatan (SKJ)	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal	

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.2</b>	<b>Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>										
		RK.191	Assesment bagi administrator dan jabatan fungsional	IO.191.1	Jumlah laporan Assesment bagi administrator dan jabatan fungsional	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
		RK.192	Uji potensi dan uji kompetensi manajerial sosial kultural	IO.192.1	Jumlah laporan Uji potensi dan uji kompetensi manajerial sosial kultural	1	1			Pusat Penilaian Kompetensi	BPSDM
<b>S.12</b>	<b>Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN</b>										
<b>K.21</b>	<b>Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM ASN Bidang Hukum dan HAM</b>	RK.193	Penguatan kapasitas dan kapabilitas asesor	IO.193.1	Jumlah Asesor yang mendapat peningkatan kapasitas dan kapabilitas (orang)		38			Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM	BPSDM
		RK.194	Penyelenggaraan assessment kompetensi	IO.194.1	jumlah asesmen kompetensi yang diselenggarakan (kegiatan)		17			Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM	BPSDM



No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.2</b>	<b>Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>										
		RK.195	Penyusunan instrumen penilaian kompetensi	IO.195.1	Jumlah penyusunan instrumen penilaian kompetensi (kegiatan)		2			Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM	BPSDM
		RK.196	Feedback penilaian kompetensi	IO.196.1	Jumlah Feedback penilaian kompetensi (kegiatan)		7			Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM	BPSDM
		RK.197	Tata Kelola Data dan Informasi	IO.197.1	Jumlah dokumen data penilaian dan pengembangan Kompetensi (Dokumen)		1			Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM	BPSDM
		RK.198	Pengembangan kompetensi SDM ASN Bidang hukum dan HAM	IO.198.1	Jumlah laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM ASN Kementerian hukum dan HAM		1			Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	BPSDM

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>SS.2</b>	<b>Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>										
		RK.199	Penyusunan atau reviu kurikulum, modul dan bahan ajar Pelatihan SDM ASN Bidang Hukum dan HAM	IO.199.1	Jumlah laporan pelaksanaan penyusunan atau reviu kurikulum, modul dan bahan ajar Pelatihan SDM ASN Kementerian Hukum dan HAM		1			Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	BPSDM
		RK.200	Penyelenggaraan pengembangan Pelatihan SDM ASN Bidang Hukum dan HAM	IO.200.1	Jumlah laporan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan Pelatihan SDM ASN Kementerian Hukum dan HAM		1			Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	BPSDM
		RK.201	Monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan pengembangan Pelatihan SDM ASN Bidang Hukum	IO.201.1	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca		1			Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan	BPSDM

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.2</b>	<b>Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>									
		dan HAM		pelaksanaan pengembangan Pelatihan SDM ASN Kementerian Hukum dan HAM					HAM, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	
		RK.202 Perencanaan penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM di kewilayahan	IO.202.1	Jumlah laporan pelaksanaan perencanaan penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM di kewilayahan		1			Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara	BPSDM
		RK.203 Pelaksanaan Diklat Hukum dan HAM di kewilayahan	IO.203.1	Jumlah laporan pelaksanaan Diklat Hukum dan HAM di kewilayahan		1			Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM	BPSDM

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.2</b>	<b>Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>									
									Sulawesi Utara	
		RK.204	Rekrutmen dan Seleksi Jabatan Fungsional Asesor SDM	IO.204.1	Jumlah laporan rekrutmen dan seleksi Jabatan Fungsional Asesor SDM	2	2		Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
<b>S.13</b>	<b>Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien</b>									
<b>K.22</b>	<b>Rekrutmen SDM ASN Kemenkumham</b>	RK.205	Perencanaan ASN	IO.205.1	Jumlah dokumen perencanaan ASN		1		Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
	<b>*(Berdasarkan Permen PAN RB no 27 tahun 2021)</b>	RK.206	Pengumuman lowongan	IO.206.1	Jumlah laporan pelaksanaan pengumuman lowongan		1		Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
		RK.207	Penerimaan pelamaran lowongan	IO.207.1	Jumlah laporan pelaksanaan penerimaan pelamaran lowongan		1		Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.2</b>	<b>Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>										
		RK.208	Pelaksanaan seleksi calon SDM ASN	IO.208.1	Jumlah laporan pelaksanaan seleksi calon SDM ASN		1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
		RK.209	Pengumuman hasil seleksi	IO.209.1	Jumlah laporan pelaksanaan pengumuman hasil seleksi		1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
		RK.210	Pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS	IO.210.1	Jumlah laporan pelaksanaan pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS		1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
		RK.211	Pengangkatan menjadi PNS	IO.211.1	Jumlah laporan pelaksanaan pengangkatan menjadi PNS		1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional										
S.14	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN										
K.23	Implementasi digitalisasi pada proses pengelolaan ASN Kemenkumham	RK.212	Evaluasi aplikasi SIMPEG	IO.212.1	Jumlah laporan hasil evaluasi aplikasi SIMPEG		2			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
		RK.213	Pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen karir	IO.213.1	Jumlah laporan pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen karir		1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
		RK.214	Integrasi SIMPEG dalam mewujudkan satu data ASN Kemenkumham	IO.214.1	Jumlah laporan pelaksanaan Integrasi SIMPEG dalam mewujudkan satu data ASN Kemenkumham		1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.2</b>	<b>Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>									
		RK.215	Digitalisasi proses bisnis pengelolaan SDM ASN Kemenkumham	IO.215.1	Jumlah laporan pelaksanaan digitalisasi proses bisnis pengelolaan SDM ASN Kemenkumham		1		Kepala Biro Kepegawaian	Kepala Biro Kepegawaian
<b>S.15</b>	<b>Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja</b>									
<b>K.24</b>	<b>Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN</b>	RK.216	Penyusunan standar kinerja SDM ASN Kemenkumham yang selaras dengan kinerja organisasi	IO.216.1	Jumlah laporan pelaksanaan penyusunan standar kinerja SDM ASN Kemenkumham yang selaras dengan kinerja organisasi	1	1		Seluruh Kepala Biro, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>SS.2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>											
		RK.217	Pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham (SKP dan Perilaku)	IO.217.1	Jumlah laporan pelaksanaan pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham (SKP dan Perilaku)	1	1			Seluruh Kepala Biro, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT
		RK.218	Monitoring dan evaluasi kinerja SDM ASN Kemenkumham berdasarkan kinerja	IO.218.1	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja SDM ASN Kemenkumham berdasarkan kinerja	2	2			Seluruh Kepala Biro, Kepala Pusdatin, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT



No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>										
		RK.219	Pembentukan tim penyusun Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan kinerja	IO.219.1	Jumlah laporan pembentukan tim penyusun Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan kinerja	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
		RK.220	Penyusunan KEPMEN pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan kinerja	IO.220.1	Jumlah laporan penyusunan KEPMEN pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan kinerja	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
		RK.221	Implementasi pemberian penghargaan dan sanksi berbasis kinerja	IO.221.1	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi berbasis kinerja		1		Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
SS.2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional										
S.16	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN										
K.25	Penguatan Sistem Merit	RK.222	Pelaksanaan rencana aksi sistem merit SDM ASN Kemenkumham	IO.222.1	Jumlah kegiatan perencanaan kebutuhan ASN	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
				IO.222.2	Jumlah kegiatan pengadaan ASN	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
				IO.222.3	Jumlah kegiatan pengembangan karir	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
				IO.222.4	Jumlah kegiatan promosi dan mutasi ASN	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
				IO.222.5	Jumlah kegiatan manajemen kinerja ASN	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
				IO.222.6	Jumlah kegiatan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>SS.2</b>	<b>Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>										
			IO.222.7	Jumlah kegiatan Perlindungan dan Pelayanan ASN	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal	
			IO.222.8	Jumlah kegiatan pengembangan dan pengelolaan SIMPEG	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal	
<b>K.26</b>	<b>Pelaksanaan Core Values ASN</b>	RK.223	Sosialisasi tata nilai PASTI dan BerAKHLAK	IO.223.1	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi tata nilai PASTI dan BerAKHLAK	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
		RK.224	Implementasi tata nilai PASTI dan BerAKHLAK	IO.224.1	Jumlah laporan Implementasi tata nilai PASTI dan BerAKHLAK	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal
		RK.225	Monitoring dan evaluasi Implementasi tata nilai PASTI dan BerAKHLAK	IO.225.1	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi tata nilai PASTI dan BerAKHLAK	1	1			Kepala Biro Kepegawaian	Sekretariat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>											
K.27	<b>Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima</b>	RK.226	Pelaksanaan layanan publik	IO.226.1	Jumlah laporan pelaksanaan layanan publik	1	1			Kepala Biro Hukerma, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal	Seluruh Unit Eselon I
K.28	<b>Menerapkan prinsip- prinsip manajemen ASN secara professional</b>	RK.227	Pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi	IO.227.1	Jumlah laporan pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi	1	1			1. Pusat Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan 2. Pusat Pelatihan Fungsional dan HAM	BPSDM
		RK.228	Pendampingan penyusunan analisis jabatan dan evaluasi ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan HAM	IO.228.1	Jumlah laporan pendampingan penyusunan analisis jabatan dan evaluasi ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan HAM	1	1			Kepala Biro Perencanaan, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat	Seluruh Unit Eselon I, Kanwil dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>										
								Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT		
		RK.229	Penyempurnaan Nama Jabatan dan Kelas Jabatan terkait dengan Evaluasi Jabatan	IO.229.1	Jumlah laporan penyempurnaan Nama Jabatan dan Kelas Jabatan terkait dengan Evaluasi Jabatan	1	1		Kepala Biro Perencanaan	Sekretariat Jenderal
K.29	Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN	RK.230	Monitoring dan Evaluasi implementasi peningkatan disiplin pegawai	IO.233.1	Jumlah laporan monitoring dan Evaluasi implementasi peningkatan disiplin pegawai	2	2		Kepala Biro Kepegawaian, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	Seluruh Unit Eselon I, Kantor wilayah dan UPT

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional</b>										
		RK.231	Internalisasi dan publikasi kode Etik Pegawai	IO.234.1	Jumlah laporan internalisasi dan publikasi kode Etik Pegawai	2	2		Kepala Biro Kepegawaian, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi dan seluruh fungsi administrasi di UPT	Seluruh Unit Eselon I, Kantor wilayah dan UPT
		RK.232	Melakukan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	IO.235.1	Jumlah laporan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	1	1		Kepala Biro Kepegawaian, Seluruh Sekretaris Ditjen, Seluruh Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Administrasi	Seluruh Unit Eselon I

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
SS.2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional								
									dan seluruh fungsi administrasi di UPT

Tabel 3. 4 Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>SS.T.1</b>	<b>Meningkatnya pelaksanaan RB Tematik Kemenkumham</b>										
<b>ST.1</b>	<b>Kontribusi Kemenkumham dalam Pengentasan Kemiskinan</b>										
<b>KT.1</b>	<b>Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengentasan kemiskinan</b>	RKT.1	Rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengentasan kemiskinan yang selesai diharmonisasi	IO.RKT.1	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengentasan kemiskinan yang selesai diharmonisasi	1	1			Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
<b>ST.2</b>	<b>Kontribusi Kemenkumham dalam Peningkatan Investasi</b>										
<b>KT.2</b>	<b>Pengelolaan layanan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha</b>	RKT.2	Pengelolaan layanan pengurusan pendirian perseroan terbatas dan perseroan perseorangan dalam mendukung kemudahan berusaha	IO.RKT.1	Jumlah layanan administrasi pendirian perseroan terbatas dan perseroan perseorangan dalam mendukung kemudahan berusaha	2	2			Direktur Badan Usaha	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum



No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.T.I Meningkatkan pelaksanaan RB Tematik Kemenkumham</b>										
		RKT.3	Pengelolaan layanan jaminan fidusia serta layanan administrasi kurator dan pengurus dalam mendukung kemudahan berusaha	IO.RKT.2	Jumlah layanan jaminan fidusia serta layanan administrasi kurator dan pengurus dalam mendukung kemudahan berusaha	2	2		Direktur Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
KT.3	Pengelolaan layanan keimigrasian untuk menarik investor dalam mendukung peningkatan investasi	RKT.4	Pengelolaan layanan keimigrasian	IOT RKT.3	Jumlah laporan layanan keimigrasian	9	9		Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Direktur Kerjasama Keimigrasian, Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Kepala Kantor	Direktorat Jenderal Keimigrasian

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.T.I Meningkatkan pelaksanaan RB Tematik Kemenkumham</b>									
								Wilayah Imigrasi, UPT Keimigrasian	
KT.4	Pengelolaan layanan Kekayaan Intelektual (KI) dalam meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	RKT.5 Pengelolaan layanan Kekayaan Intelektual	IO RKT.4	Jumlah laporan layanan Kekayaan Intelektual	6	6		Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Kerja Sama dan Pemberdaya an Kekayaan Intelektual,	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab			
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT		
<b>SS.T.I</b>	<b>Meningkatnya pelaksanaan RB Tematik Kemenkumham</b>										
									Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Kepala Kantor Wilayah Kekayaan Intelektual		
<b>ST.3</b>	<b>Digitalisasi Administrasi Kemenkumham</b>										
<b>KT.5</b>	<b>Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional (note: berdasarkan roadmap SPBE Kemenkumham tahun 2023- 2024)</b>	RK.6	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Sekretariat Jenderal	IO.RKT.5	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Sekretariat Jenderal yang terlaksana (Kegiatan)	29	28			Kepala Pusat Data dan Informasi	Sekretariat Jenderal
		RK.7	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal	IO.RKT.6	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan	2	5			Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.T.I</b>	<b>Meningkatnya pelaksanaan RB Tematik Kemenkumham</b>								
				Inspektorat Jenderal yang terlaksana (Kegiatan)					
		RK.8	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi	IO.RKT.7	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi yang terlaksana (Kegiatan)	10	7		Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian  Direktorat Jenderal Keimigrasian
		RK.9	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	IO.RKT.8	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang terlaksana (Kegiatan)	4	6		Direktur Teknologi Informasi  Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
					2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.T.I</b>	<b>Meningkatnya pelaksanaan RB Tematik Kemenkumham</b>										
		RK.10	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan	IO.RKT.9	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan yang terlaksana (Kegiatan)	14	27			Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama	Direktorat Jenderal Pemasaryakatan
		RK.11	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	IO.RKT.10	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang terlaksana (Kegiatan)	11	8			Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan	Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
				2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.T.I</b>	<b>Meningkatnya pelaksanaan RB Tematik Kemenkumham</b>									
		RK.12	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	IO.RKT.11	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang terlaksana (Kegiatan)	3	5		Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
		RK.13	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	IO.RKT.12	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang terlaksana (Kegiatan)	8	8		Direktur Fasilitas dan Informasi Hak Asasi Manusia	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan	Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab		
					2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT	
<b>SS.T.I Meningkatnya pelaksanaan RB Tematik Kemenkumham</b>											
		RK.14	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Badan Pembinaan Hukum Nasional	IO.RKT.13	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang terlaksana (Kegiatan)	6	8			Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Badan Pembinaan Hukum Nasional
		RK.15	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	IO.RKT.14	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang terlaksana (Kegiatan)	5	2			Pusat Strategi Kebijakan Evaluasi dan Pengelolaan Data Informasi Kebijakan hukum dan HAM	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

No	Sasaran ( <i>immediate outcome</i> ) / Kegiatan Utama	Rincian kegiatan		Indikator output dari rincian kegiatan		Target		Waktu pelaksanaan		Penanggung jawab	
						2023	2024	2023	2024	Eselon II	Eselon I, Kanwil dan UPT
<b>SS.T.I Meningkatkan pelaksanaan RB Tematik Kemenkumham</b>											
		RK.16	Pelaksanaan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	IO.RKT.15	Jumlah kegiatan arsitektur SPBE Kemenkumham terkait tugas dan kewenangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang terlaksana (Kegiatan)	5	4			Kepala Pusat Penilaian Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
<b>ST.4 Percepatan Prioritas Aktual Presiden</b>											
KT.6	<b>Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) di lingkungan Kemenkumham</b>	RK.16	Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa Kemenkumham TA 2024	IO.RKT.16	Jumlah laporan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa Kemenkumham	1	1			Kepala Biro BMN	Sekretariat Jenderal

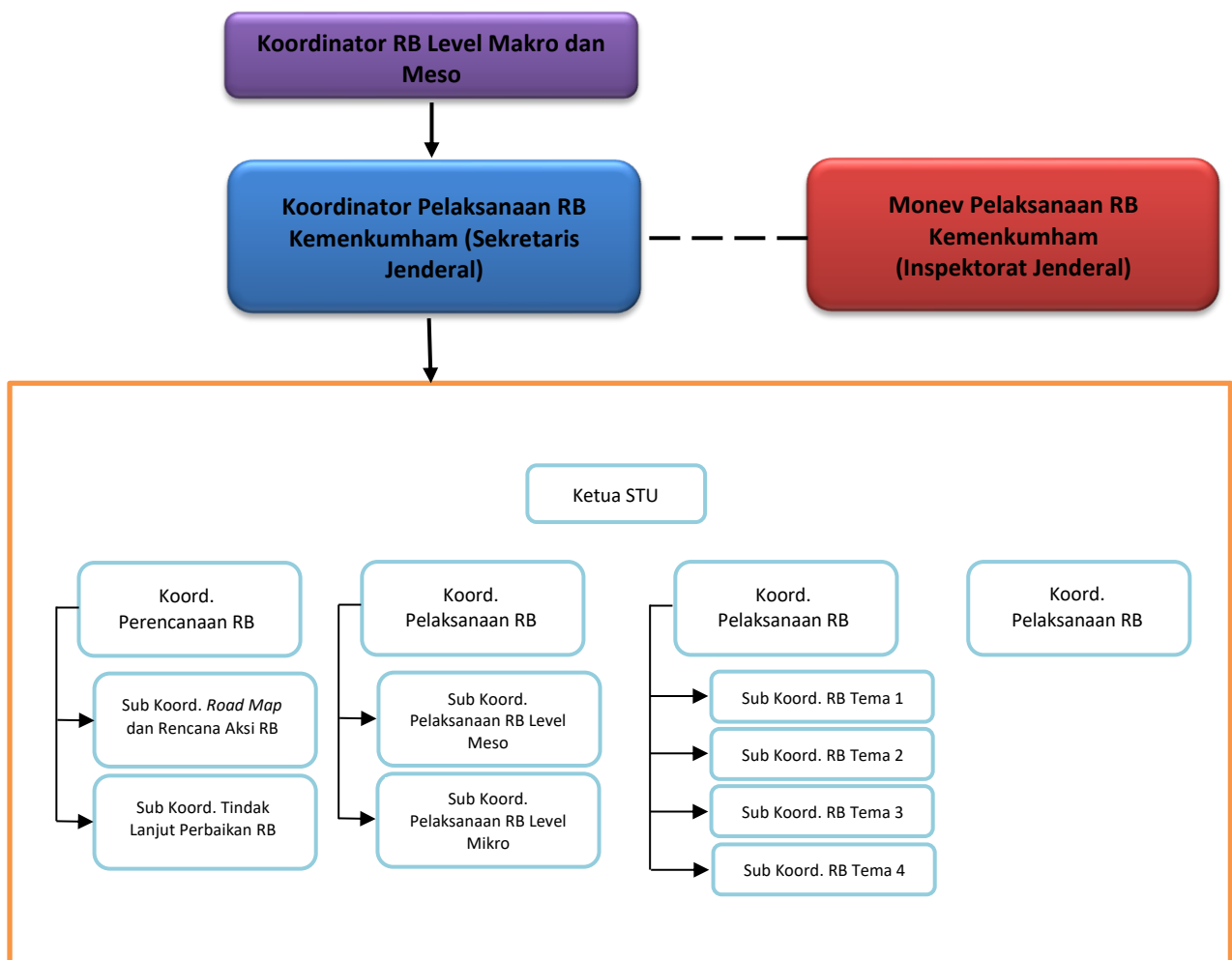


## BAB IV MANAJEMEN/PENGELOLAAN RB KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

### 4.1. *Strategic Transformation Unit (STU)* Kementerian Hukum dan HAM

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di level mikro adalah soliditas dan kerja tim yang optimal dalam melaksanakan seluruh kegiatan utama hingga rincian kegiatan secara konsisten dan berkesinambungan. *Strategic Transformation Unit (STU)* merupakan tim atau unit pengelola RB internal Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023, struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. Tugas STU dalam pelaksanaan RB adalah menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Dalam pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM, STU merupakan struktur *ad hoc* yang menempatkan unit struktural dan fungsional sebagai STU dengan mempertimbangkan kedekatan tugas dan fungsi masing-masing. Struktur organisasi STU Kementerian Hukum dan HAM ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 4.1 Struktur STU Kementerian Hukum dan HAM

STU Kementerian Hukum dan HAM bekerja dibawah koordinator pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM. Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengawas internal akan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM.

STU Kementerian Hukum dan HAM akan dipimpin oleh ketua STU yang merupakan Pejabat Tinggi Negara setingkat Eselon II yang ditunjuk oleh Koordinator Pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM. Ketua STU membawahi 14 koordinator yang meliputi:

▪ **1 (satu) Koordinator Perencanaan RB**

Koordinator Perencanaan RB bertanggung jawab dalam perencanaan RB Kementerian Hukum dan HAM. Koordinator Perencanaan RB akan dibantu oleh 2 (dua) sub koordinator, yaitu (i) Sub Koordinator *Road Map* dan Rencana Aksi RB yang bertanggung jawab terhadap penyusunan *draft Road Map* RB Kementerian Hukum dan HAM dan Rencana Aksi RB Kementerian Hukum dan HAM, serta (ii) Sub Koordinator Tindak Lanjut perbaikan RB yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Tindak Lanjut (TL) RB berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev).

▪ **1 (satu) Koordinator Pelaksanaan RB General**

Koordinator Pelaksanaan RB General bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RB general. Koordinator Pelaksanaan RB General dibantu oleh 2 (dua) sub koordinator, yaitu:

- Sub Koordinator Pelaksanaan RB level Meso yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan RB level meso sesuai peran Kementerian Hukum dan HAM
- Sub Koord. Pelaksanaan RB Level Mikro yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan RB level mikro.

▪ **1 (satu) Koordinator Pelaksanaan RB Tematik**

Koordinator Pelaksanaan RB Tematik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 4 (empat) tema RB tematik. Koordinator Pelaksanaan RB Tematik dibantu oleh 4 (empat) orang sub koordinator, yaitu:

- Sub Koordinator RB Tema 1, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan RB tematik Kementerian Hukum dan HAM untuk tema pengentasan kemiskinan.
- Sub Koordinator RB Tema 2, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan RB tematik Kementerian Hukum dan HAM untuk tema peningkatan investasi.
- Sub Koordinator RB Tema 3, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan RB tematik Kementerian Hukum dan HAM untuk tema digitalisasi administrasi pemerintahan.
- Sub Koordinator RB Tema 4, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan RB tematik Kementerian Hukum dan HAM untuk tema pemanfaatan PDN

- **11 (sebelas) Koordinator Pelaksanaan RB Unit Kerja Eselon (UKE) I**  
11 (sebelas) Koordinator Pelaksanaan RB UKE I bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RB di masing-masing UKE I. Koordinator Pelaksanaan RB UKE I akan melakukan koordinasi dengan seluruh koordinator dalam pelaksanaan RB. Koordinator Pelaksanaan RB UKE I dapat membentuk tim internal RB di setiap UKE I dalam membantu melaksanakan RB di masing-masing UKE I.

#### 4.2 Peran STU Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan struktur STU pada gambar 4.1, maka detail peran/tugas masing-masing tim dapat dijabarkan berikut ini.

1. Koordinator Pelaksanaan RB Kemenkumham, memiliki rincian peran/tugas:
  - Bertanggung jawab terhadap RB Kementerian hukum dan HAM
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan RB level meso (sebagai *leading institution*) setiap 6 bulan sekali
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan RB level mikro setiap 6 bulan sekali
2. Koordinator Monev Pelaksanaan RB Kemenkumham, memiliki rincian peran/tugas:
  - Melaksanakan monev RB Kemenkumham 6 bulanan
  - Melaksanakan monev RB Kemenkumham tahunan
  - Melaksanakan pengawasan internal atas pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM
3. Ketua STU, memiliki rincian peran/tugas:
  - Bertanggung jawab terhadap seluruh implementasi RB Kementerian Hukum dan HAM
  - Memimpin STU dalam implementasi RB Kementerian Hukum dan HAM
4. Koordinator Perencanaan RB, memiliki rincian peran/tugas:
  - Merumuskan *Road Map* Pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM
  - Merumuskan rencana aksi RB Kementerian Hukum dan HAM
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan RB berdasarkan hasil monev
  - Koordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Anggaran dalam memastikan perencanaan RB dimasukkan ke dalam Renstra, Renja, dan RKA K/L
  - Menjaga kesinambungan pelaksanaan RB yang telah berjalan
  - Melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan *stakeholder*
5. Sub Koordinator Roadmap dan Rencana Aksi RB, memiliki rincian peran/tugas:
  - Menyusun *draft Road Map* pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM
  - Menyusun *draft* rencana aksi RB Kementerian Hukum dan HAM
6. Sub Koordinator Tindak Lanjut Perbaikan RB, memiliki rincian peran/tugas:
  - Mengidentifikasi masalah dan akar permasalahan pelaksanaan RB berdasarkan hasil monev
  - Menyusun *draft* laporan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan RB
7. Koordinator Pelaksanaan RB General, memiliki rincian peran/tugas:

- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan utama RB General
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan utama RB level meso yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM
  - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan utama RB General
  - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan utama RB level meso yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM
8. Sub Koordinator Pelaksanaan RB level Meso, memiliki rincian peran/tugas:
- Membantu koordinasi pelaksanaan RB level meso yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM
  - Menyusun *draft* laporan pelaksanaan RB level meso yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM
9. Sub Koordinator Pelaksanaan RB Level Mikro, memiliki rincian peran/tugas:
- Membantu koordinasi pelaksanaan kegiatan utama RB General
  - Menyusun *draft* laporan pelaksanaan RB General
10. Koordinator Pelaksanaan RB Tematik, memiliki rincian peran/tugas:
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan utama RB Tematik
  - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan utama RB Tematik
11. Sub Koordinator RB Tema 1, memiliki rincian peran/tugas:
- Membantu koordinasi pelaksanaan kegiatan utama RB Tema pengentasan kemiskinan
  - Menyusun *draft* laporan pelaksanaan kegiatan utama RB Temapengentasan kemiskinan
12. Sub Koordinator RB Tema 2, memiliki rincian peran/tugas:
- Membantu koordinasi pelaksanaan kegiatan utama RB Tema peningkatan investasi
  - Menyusun *draft* laporan pelaksanaan kegiatan utama RB Temapeningkatan investasi
13. Sub Koordinator RB Tema 3, memiliki rincian peran/tugas:
- Membantu koordinasi pelaksanaan kegiatan utama RB Tema digitalisasi administrasi pemerintahan
  - Menyusun *draft* laporan pelaksanaan kegiatan utama RB Tema digitalisasi administrasi pemerintahan
14. Sub Koordinator RB Tema 4, memiliki rincian peran/tugas:
- Membantu koordinasi pelaksanaan kegiatan utama RB Tema pemanfaatan PDN
  - Menyusun *draft* laporan pelaksanaan kegiatan utama RB Tema 4 pemanfaatan PDN
15. Koordinator Pelaksanaan RB UKE I, memiliki rincian peran/tugas:
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan *road map* serta rencana aksi RB di masing-masing UKE I
  - Melaksanakan rekomendasi tindak lanjut perbaikan pelaksanaan RB berdasarkan hasil money

- Sinkronisasi pelaksanaan RB dengan pelaksanaan Renstra, Renja, dan RKA K/L

#### **4.3 Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM**

Monitoring, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan HAM sangat penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan RB dapat mencapai sasaran yang dituju, khususnya dalam mendorong pembangunan nasional serta dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023, monev pelaksanaan RB dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pelaksanaan monev, permasalahan maupun hambatan dalam pelaksanaan RB perlu digali lebih dalam untuk mencari akar permasalahan atas permasalahan yang muncul. Hal ini dilakukan untuk memastikan perbaikan yang dilakukan dapat menyelesaikan akar permasalahan atas permasalahan yang muncul. *tools* yang bisa digunakan dalam menganalisis akar masalah adalah diagram tulang ikan (*fishbone diagram*) Ishikawa atau pohon masalah (*problem tree*).

Berdasarkan akar permasalahan tersebut, kemudian ditentukan rencana tindak lanjut perbaikan dengan mempertimbangkan prioritas dan faktor risiko yang mungkin muncul beserta rencana pengendalian risiko, yaitu tindakan pencegahan (*preventive action*) maupun rencana penanggulangan ketika risiko tersebut terjadi (*corrective action*). Tindak lanjut hasil monev yang dihasilkan harus dapat dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja (satker) pusat maupun kewilayahan, kemudian dimonev kembali untuk melihat apakah solusi yang diberikan sudah dapat menyelesaikan akar permasalahan yang ada. Komitmen dalam melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil monev sangat penting dibangun dan dilaksanakan oleh seluruh koordinator dalam tim STU, sesuai dengan peran/tugas masing-masing.

## BAB V PENUTUP

Reformasi Birokrasi Nasional telah memasuki fase akhir dalam Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025, melalui implementasi *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Dalam perjalanannya, evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi cenderung bersifat administratif sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong pembangunan nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga dinilai masih belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, khususnya terkait layanan publik yang diberikan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Regulasi ini mengamankan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berkontribusi dalam menyelesaikan isu dan permasalahan nasional serta dapat dirasakan dampaknya secara langsung bagi masyarakat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menitikberatkan pada tata kelola birokrasi internal dalam menyelesaikan permasalahan tingkat hulu serta menitikberatkan pada dampak terhadap pembangunan nasional dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat hilir. Hal ini selaras dengan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Penajaman reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersih, efektif, dan berdaya saing dalam mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab seluruh pejabat maupun ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga koordinasi dan kolaborasi sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan pembangunan nasional dan memberikan pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
YASOWATI H. LAOLY

